STUDI GENDER

Dr. HJ. Doty Mulyanti, M.Pd.



2020

CV Kimfa Mandiri
ISBN : 978-602-50828-2-5



Lahir di Majalengka 15 September 1979 Pendidikan S1 Universitas Pasundan 2006, Pendidikan S2 Universitas Pendidikan Indonesia 2009, S3 Universitas Islam Nusantara 2015. Mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta dan dosen tetap Universitas Bale Bandung (UNIBBA). Dr. Hj. Dety Mulyanti, dosen fakultas keguruan ilmu pendidikan program studi pendidikan IPS UNIBBA. Buku yang telah diterbitkan Sistem Perekonomian Indonesia, Strategi Pembelajaran IPS dan Kapita Selekta IPS. Fokus penelitian pada budaya, ekonomi, manajemen yang telah diterbitkan di beberapa jurnal nasional, internasional bereputasi dan scopus. Selain aktif di dunia akademisi, aktif organisasi menjadi Wasekjen ABPPTSI (Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) di Pusat dan Jawa Barat.

9 786025 082825

STUDI GENDER

Penulis :

Dr. Hj. Dety Mulyanti, M.Pd.

ISBN : 978-602-50828-2-5

Editor :

Prof. Dr. Thomas Suyatno

Penyunting :

Dr. Mulyaningsih, M.Si.

Dr. Diana Silaswati, M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak :

Lysda Reviyanti, M.Pd.

Nina Kania, M.Si.

Penerbit :

CV KIMFA MANDIRI

Redaksi :

Jl. Ciapus RT 001 RW 006 Desa Ciapus

Kec. Banjaran Kab. Bandung 40377

No Telepon : 022-88883057 / 082217220165 – 081220816826

Email : kimfamandiriks@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya yang telah tercurah, sehingga penulis bisa menyelesaikan Buku Studi gender. Adapun tujuan dari disusunnya buku ini adalah sebagai salah satu bahan ajar khususnya pada mata kuliah Studi Gender guna membantu dosen dan mahasiswa sebagai calon seorang guru dalam memahami kajian gender yang merupakan kajian interdisipliner yang meliputi ilmu-ilmu sosial terutama sosiologi, yang terkait dengan antropologi, psikologi, dan ekonomi.

Kesetaraan gender bicara mengenai relasi yang sejajar di antara laki- laki dan perempuan, khususnya dalam konteks persamaan perlakuan, akses, dan kesempatan di perbagai bidang kehidupan. Perdebatan banyak muncul berkaitan dengan belum adanya kesetaraan gender dan adanya pembatasan untuk memasuki bidang- bidang tertentu baik bagi perempuan maupun laki- laki.

Tersusunnya buku ini tentu bukan dari usaha penulis seorang. Dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu tersusunnya buku ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, rekan-rekan, dan pihak-pihak lainnya yang membantu secara moral dan material bagi tersusunnya buku ini.

Buku yang tersusun sekian lama ini tentu masih jauh dari kata sempurna, untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar buku ini bisa lebih baik nantinya.

Bandung, Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Pendahuluan

1. Sejarah Gender 1
   A. Sejarah Perjuangan Perempuan Tingkat Internasional 1
   B. Sejarah Perjuangan Perempuan Tingkat Nasional 5
   C. Tantangan Perempuan Di Era Globalisasi 13
   D. Revolusi Industri 4.0 18

2. Ketidak Adilan Gender
   A. Ketidak Adilan Gender 22
   B. Bentuk-bentuk Ketidak Adilan Gender 23
   C. Kebutuhan Gender 24
   D. Jenis-Jenis Kebutuhan Gender 25

3. Pemahaman Gender
   A. Kodrat dan Non Kodrat 27
   B. Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender 29
   C. Pengertian Gender 33
   D. Peran Gender 35

4. Kurikulum yang Berwawasan Gender
   A. Pengertian Kurikulum yang Berwawasan Gender 37
   B. Pengertian Penggarustamaan Gender 42

5. Gender dalam Dunia Pendidikan
   A. Indikator Gender 47
   B. Perkembangan PUG Bidang Pendidikan 50
   C. Implementasi PUG Bidang Pendidikan 51
   D. Bahan Ajar Gender 54
   E. Kiat Menulis Bahan Ajar berwawasan Gender 56

Daftar Pustaka 59

PENDAHULUAN

1. Sejarah Gender

A. Sejarah Perjuangan Perempuan Tingkat Internasional

Manusia adalah makluk ciptaan Tuhan dengan dua jenis kelamin berbeda, yaitu perempuan dan laki-laki. Sekalipun perempuan dan laki-laki diciptakan berbeda namun keduanya memiliki derajat, harkat, dan martabat yang sama. Perbedaan ke dua jenis kelamin dimaksudkan agar bisa saling melengkapi guna membangun suatu kekuatan baru yang lebih kuat, dan bermanfaat bagi kelangsungan umat manusia dimuka bumi ini.

Dalam perjalanan sejarah dan budaya manusia terjadi pembagian peranan dan status antara perempuan dan laki-laki. Peran dan status disepakati sesuai dengan tuntutan kebutuhan, namun dalam realitas terjadi dominasi oleh satu pihak dengan yang lain, sehingga menimbulkan ketidak adilan dan ketidak kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Pihak perempuan seringkali berada pada posisi yang terpinggirkan.

Perempuan menyadari ketertinggalannya dibandingkan kaum laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.Untuk mengejar ketertinggalan kaum perempuan maka dicari berbagai upaya yang dimulai dengan Emansipasi (kesamaan). Gerakan perempuan untuk merubah keadaan yang menekan dan membatasi kehidupan mereka secara terorganisisr di mulai pada tanggal 8 Maret 1857, dimana para buruh perempuan di pabrik tenun di New York

melakukan unjuk rasa untuk memprotes kondisi kerja yang tidak manusiawi dua belas jam kerja, dan upah rendah, ratusan buruh perempuan in diserang oleh polisi. Tidak ada yang membela dan berusaha melindungi serta memperbaiki nasib pekerja perempuan karena tidak ada wakil perempuan yang duduk dilembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif pada masa itu.

Hal ini mendorong pegiat perempuan berjuang menuntut agar perempuan mendapat perlakuan yang adil dan menuntut terpenuhinya hak-hak perempuan. Tanggal 8 Maret 1908 : 15 ribu perempuan berunjuk rasa di New York untuk menuntut terpenuhinya hak perempuan : a) Hak memilih, b) Hak politik dan c) Hak Ekonomi. Perjuangan perempuan tidak pernah berhenti, pada tahun 1910 diselenggarakan konferensi perempuan di Kopenhagen yang dihadiri 100 perempuan dari 17 Negara, diterima suatu usulan untuk mencanangkan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Sedunisa. Intinya adalah memperjuangkan hak perempuan untuk memilih dalam pemilu, tunjangan melahirkan dan penghapusan kerja malam. Pada tahun 1920 hak politik perempuan Amerika baru diberikan. Namun perubahan hak perempuan tidak terlalu nampak bahkan bertambah para ketika perang dunia ke II, terjadi pelanggaran hak yang meluas atas orang dan kelompok termasuk perempuan dan anak. Oleh karena itu pejuang masalah perempuan tetap gigi berjuang guna memperoleh pengakuan dan jaminan terhadap hak-hak perempuan. Suara, keinginan dan tuntutan pejuang masalah perempuan terus berkumandang dan gemanya terpantul ke seluruh penjuru dunia. Salah satu hasilnya pada tahun 1946 terbentuk komisi Kedudukan Perempuan (CSW) yang merupakan wadah dan langkah pertama untuk memajukan hak-hak politik ekonomi dan sosial perempuan. Atas inisiatif komisi ini bersama dengan badan- badan khusus PBB maka ada sejumlah konvensi dan deklarasi disahkan oleh Majelis Umum PBB.

Misalnya Konvensi nasionalitas perempuan tahun 1857 serta deklarasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tahun 1967. Pada tahun 1975 di Mexico City diselenggarakan *" World Conference International Year of Women* " PBB, yang menghasilkan deklarasi kesamaan antara laki-laki, dan perempuan dalam hal : a) pendidikan dan pekerjaan, b) memprioritaskan pembangunan bagi kaum perempuan, c) memperluas partisipasi perempuan dalam pembangunan, d) tersedia data dan informasi partisipasi perempuan dan e) pelaksanaan analisa perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin. Dalam rangka melaksanakan deklarasi tersebut, telah dikembangkan berbagai program untuk pemberdayaan perempuan (*Women Emporment Programs).* Guna mewadahi aktifitas tersebut maka diperkenalkan tema *perempuan dalam pembangunan* (pemberdayaan perempuan secara kuantitas). *Women In Development* yang disingkat dengan WID). WID lebih menekankan peningkatan

Pada tahun 1980 di Kopenhagen di lakukan *World conference UN Mid decade of Women*, dimana dalam konverensi in disahkan : *UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW),* yaitu konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pada tahun 1985 di Nairobi, diadakan "*World Conference on Result on Ten Years Women Movement,* yang menghasilkan *Forward Looking Strategis for the Advancement of Women* dengan menekankan pada kesetaraan perempuan dalam pembangunan dan perdamaian. PBB pada tahun 1985 membentuk suatu badan yang disingkat UNIFEM (*The UNITED Nations For Women),* untuk melakukan studi advolasi, kolaborasi dan mendanai kegiatan kesetaraan gender secara International. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan perempuan tanpa melibatkan kerja sama dengan kaum laki-laki yang dilakukan 10 tahun (antara 1970-1980) tidak banyak menampakkan hasil yang memadai bahkan timbul sinistis dari kaum laki-laki

terhadap perjuangan tersebut. Berdasarkan berbagai studi maka tema WID *(Women in Development*) atau perempuan dalam pembangunan diubah menjadi pendekatan WAD atau (*Women and Development)* atau perempuan dan pembangunan. Kata **dalam** diganti dengan kata **dan** yang memberi makna bahwa kualitas (mutu) kesertaan lebih penting dari sekedar kuantitas (jumlah). Pada tahun 1990 di Vienna diselenggarakan *the 34 th Commission on the Status of Women* dilakukan analisis terhadap konsep pemberdayaan perempuan tanpa melibatkan laki-laki nampaknya kurang membawa hasil seperti yang diharapkan. Dari Study Anderson (1992) dan Moser (1993) memberi rekomendasi bahwa tanpa kerelaan, kerjasama dan keterlibatan kaum laki-laki maka program pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil dengan baik. Oleh karena itu dipergunakan pendekatan gender yang kemudian dikenal dengan *Gender and Development* (GAD), suatu para digma baru yang menekankan pada prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki atau sebaliknya Pandangan itu terus diperdebatkan dalam the *International Conference on population and Development* (ICPD) di Cairo, 1994 dan the 4 th *World Conference om Women*, Beijing l995. Sejarah telah mencatat Kota Beijing sebagai tempat penting bagi perempuan sedunia. Perempuan dari berbagai lapisan telah bersepakat di Beijing pada bulan September l995, untuk terus berjuang mencapai persamaan hak, *Gender Equality*.

Di sinilah konferensi perempuan sedunia ke IV, yang berlangsung di Beijing menjadi penting karena dari berbagai pertemuan dan berbagai agenda yang telah disosialisasikan ke seluruh dunia, isu tentang perempuan justru tidak berkurang, sementara tingkat peran dan posisi perempuan mengalami perkembangan kualitatif dan kuantitatif yang penting. Konferensi Beijing mengagendakan beberapa hal sebagaimana kemudian agenda itu menjadi tujuan pertemuan. Tujuan pertemuan itu, melanjutkan perjuangan kesetaraan,

pembangunan dan perdamaian yang telah dibahasa dan diterima oleh semua anggota PBB di Mexico City tahun 1975. Dengan tujuan tersebut, maka konferensi Beijing 1995 dinamakan Konferensi Kesepakatan/Perjuangan *(Conference of Commitments*) yang menhasilkan *The Platform For Ac.*

B. Sejarah Perjuangan Perempuan Tingkat Nasional

Sesungguhnya bangsa Indonesia mempunyai pandangan hidup dan kepribadian sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia memposisikan perempuan pada keluhuran harkat dan martabat sebagai makluk cipataan Tuhan yang tertinggi. Bila membuka sejarah perjuangan bangsa Indonesia pasti setiap periode ada perempuan pejuang yang turut berjuang namun diakui jumlahnya sangat kecil dan tidak terwadahi secara kokoh dan juga tidak terdokumentasi secara baik. Hal ini menyebabkan kesulitan tersendiri menceriterakan kepada generasi muda tentang pergerakan perempuan Indonesia. Berdasarkan beberapa kajian, gerakan perempuan Indonesia dapat dilihat dari kategorisasi seperti di bawah ini:

Periode sebelum penjajahan, peristiwa sangat terpaku pada periodesasi formal misalnya berkuasanya raja atau kepala pemerintahan baru atau munculnya peristiwa politik atau ekonomi yang dianggap mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Dalam periodesasi semacam ini kaum perempuan tersembunyi dari pencacatan peristiwa penting. Perempuan yang tidak mempunyai kekuasaan politik, ekonomi ataupun militer, tidak pernah tercatat. Perempuan yang tercatat dalam sejarah pada masa ini adalah Ratu Sjima dan Tri Buana Tungga Dewi.

Periode Kolonial, dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu, Perempuan mengangkat senjata, Perempuan mendidik dan perempuan berorganisasi. *Perempuan mengangkat senjata* kita jumpai banyak tokoh perempuan yang

turut mengangkat senjata guna mempertahankan negerinya. Cut Nyak Dhien dan Cut Nak Meuthi adalah tokoh perempuan Aceh. Di Jawa ada Raden Ayu Ageng Serang yang mengangkat senjata, kemudian Roro Gusik membantu suaminya Untung Surapati mengangkat senjata pula. Di Maluku, Christina Martha Tiahahu membantu Pattimura memberontak, dan di Sulawesi Selatan, Emmy Saelan giat dalam perlawanan Wolter Monginsidi.

Mereka itulah yang berjuang mempertahankan kedaulatan , walaupun terbatas hanya untuk negerinya sendiri- sendiri. *Perempuan Mendidik*, tercatat beberapa perempuan yang mengeyam pendidikan di masa kolonial dan kemudian berupaya sekuat tenaga mendesiminasikan pengetahuannya untuk memberdayakan perempuan demi kemajuan bangsa. Mereka itu antara lain: Raden Ajeng Kartini di Jawa Tengah, Raden Dewi Sartika di Jawa Barat, Rohana Kudus di Minangkabau, Maria Walanda Maramis dari Sulawesi Utara, Nyi Hj. Ahmad Dahlan dari Yogyakarta, dan Nyi H. Rasuna Said dari Sumatera Barat. Periode perang Kemerdekaan.

Perempuan Berorganisasi, Pergerakan Kebangkitan Nasional (1908) mendorong perempuan secara kolektif membentuk organisasi perempuan yang pertama (1912) yaitu Poetri Mardika. Organisasi ini lahir pada periode kesadaran “Emansipasi Nasional”. Setelah kelahirannya, lahirlah organisasi perempuan lain, seperti Poetri Sejati, Wanita Oetama, Jong Java Meisjeskering dan lain-lain yang berbasis kedaerahan, keagamaan dan atau tujuan tertentu.

Pada bulan Desember (Tanggal 22) tahun 1928 Kongres Perempuan Indonesisa nasional pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta, dihadiri hampir 30 organisasi. Mosi mengenai pendidikan dan reformasi perkawinan diterima, sedangkan pembicaraan mengenai ko-edukasi dan penghapusan poligami menyebabkan persitegangan antara organisasi Islam dengan organisasi Kristen dan non agama. Pada kongres tersebut dibentuk Persatoean

Perempoen Indonesia (PPI). Kongres Perempuan Nasional berikutnya berturut-turut diadakan di Jakarta (l935), Bandung (l938), dan Semarang (l941). Dalam kongres tahun 1935 terbentuklah Kongres Perempuan Indonesia (KPI) yang otomatis membubarkan PPPI. Dalam ketiga kongres ini agenda perjuangan nasional berangsur mengemuka dan menjadi agenda utama.

Periode Pendudukan Jepang, pada masa pendudukan Jepang hanya satu organisasi perempuan yang diizinkan yaitu Fujinkai. Sementara gerakan nasional termasuk beberapa organisasi perempuan antara lain Gerakan wanita Sosialis, memilih bergerak di bawah tanah. Banyak kaum nasionalis, termasuk perempuan, ditangkap dan dibunuh pada periode itu.

Periode Perang Kemerdekaan, kaum perempuan turut aktif dalam merumuskan fondasi bagi cita-cita perjuangan nasional. Kaum perempuanpun berhimpun menyokong cita-cita perjuangan nasional. Desember 1945 Kongres Perempuan diselenggarakan di Kalten, dan dalam kongres berikutnya di Solo tahun1946 Kongres Wanita Indonesia dibentuk sebagai suatu federasi dari semua organisasi perempuan yang menyokong kemerdekaan bangsa Indonesia. Kaum perempuan turut memanggul senjata, membentuk dapur umum, ambil bagian dalam satuan gerilya, sambil terus menyuarakan tuntutan mereka, upah dan hak yang sama atas kerja, perbaikan hukum perkawinan, pendidikan untuk kaum perempuan dan lainnya.

Periode Orde lama, sesudah merdeka harapan bangkit dengan menjunjung emansipasi penuh seluruh rakyat tertindas perempuan dan laki-laki tetap tinggi. Namun harapan itu tak kunjung tercapai, banyak hal yang diperjuang antara lain masalah poligami sebagai salah satu masalah sentral perempuan tak kunjung terpecahkan. Sebahagian organisasi perempuan meneruskan perjuangan anti poligami (Perwari) sedangkan golongan lain mengabaikan masalah tersebut. Organisasi perempuan pada saat itu berperan dan terlibat dalam berbagai

aktivitas tetapi semakin terikat pada partai politik. Pada tahun 1950 Kongres Nasional Wanita Indonesia (KOWANI) berdiri menghimpun organisasi dan pergerakan wanita Indonesia dalam satu wadah.

Periode Orde Baru, pada tahun 1978 Kementerian Urusan Peranan wanita di bentuk dalam kabinet. Bebagai permasalahan perempuan seperti penentuan status, peran, hingga penyelesaian kasus kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan diserap untuk diurus oleh negara. Untuk menjaga kestabilan, semua kegiatan dilangsungkan dalam kendali pemerintah. Misalnya Dharma Wanita, PKK, Dharma Pertiwi. Tahun l974 Undang-Undang tentang Perkawinan disahkan. Tahun l978, untuk pertama kali dimasukkan satu bab terpisah tentang peranan perempuan dalam pembangunan bangsa, dan tahun l993 dicantumkan Mitra Sejajar, setelah itu setiap GBHN selalu tertera Bab tentang perempuan. Perlu dikemukakan di sini bahwa sekitar tahun 1970-1980an, benih-benih gerakan perempuan kontemporer mulai bersemi di kalangan menengah intelektual. Dikenal dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Goverment Organization,* sekalipun gerakannya masih lemah namun LSM melakukan analisis sosial terhadap masalah-masalah perempuan Indonesia dan menangani kasus peremuan dan anak hingga sekarang.

Periode Reformasi, pada periode Habibie suatu hal yang perlu dicatat adalah Pembentukan Komisi Nasinal Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan atau yang lebih dikenal dengan Komnas Perempuan. Dalam perkembangannya hingga sekarang, Komnas Perempuan banyak berperan sebagai lembaga yang aktif memasyarakatkan pengakuan atas hak-hak perempuan sebagai bagian dari Hak Asazi Manusia (HAM). Kemudian dalam periode kepemimpinan Gus Dur, Instruksi Presiden (Inpres) No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) ditandatangani oleh Gus Dur. Sejak itu, dalam periode Presiden Soesilo Bambang Yudojono (SBY) perhatian terhadap perempuan, gender dan Anak terus mendapat perhatian terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan,

Ekonomi, Politik, dan Hukum dan HAM. Dalam RPJMN dan RPJMD Pengarusutamaan Gender telah ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus dilakukan oleh seluruh sektor pembangunan, dipertegaskan pula oleh Presiden bahwa Gender harus menjadi *Crosscutting departmen/sector/ programme/issue.*

Era Globalisasi

Seperti yang kita ketahui bahwa emansipasi ialah istilah yang digunakan untuk menjelaskan usaha-usaha untuk mendapatkan persamaan hak politik, kesetaraan gender, serta persamaan hak dalam bidang lainnya. Sedangkan emansipasi wanita ialah suatu proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan social ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan seorang wanita untuk berkembang dan maju di segala bidang dalam kehidupan masyarakat.

Apabila berbicara mengenai emansipasi wanita di Indonesia ada sosok R.A Kartini, seorang wanita priyayi jawa yang memunyai pemikiran untuk maju pada masanya. Pemikiran untuk maju tersebut di ekspresikan melalui surat-surat korespondennya kepada sahabat Belandanya yang kemudian diangkat menjadi sebuah buku yang berjudul "Habis Gelap Terbitlah Terang". Sosok R.A. Kartini menjadi penggerak emansipasi wanita. Emansipasi yang dilakukan oleh R.A. Kartini adalah agar wanita mendapatkan hak atas pendidikan yang seluas-luasnya serta setinggi-tingginya. Jika melihat history pada zaman penjahahan yang berhak mendapat pendidikan ialah anak dari keturunan bangsawan, sehingga banyak wanita Indonesia pada masa lalu tidak mendapatkan pendidikan sama-sekali. Kemudian emansipasi yang dimaksudkan oleh R.A Kartini agar wanita diakui kecerdasannya dan diberikan kesempatan yang sama untuk mrngaplikasikan keilmuan yang dimilikinya, sehingga wanita tidak merendahkan diri dan tidak selalu di rendahkan derajatnya oleh kaum pria.

Kondisi wanita masa kini sangatlah jauh berbeda dengan kondisi wanita pada masa lalu, sekarang wanita telah merasakan kebebasan atas hak-hak yang diperjuangkan pada masa lalu. Namun emansipasi wanita dijadikan kedok kebebasan yang sebebas-bebasnya oleh kaum wanita yang sangat miris dilakukan pada zaman millenial ini. Contohnya sebagian kaum wanita dengan kebebasannya untuk memperdagangkan diri dalam balutan gaun seksi, ada juga wanita dengan kecantikannya terhubung dalam jaringan gelap prostitusi, ada pula wanita yang ingin menyamai laki-laki, dan ada banyak wanita yang dengan bangga menjadi pelacur serta hal tersebut bukan menjadi hal yang tabu oleh wanita. Dengan demikian bahwa kebebasan tersebut malah menghancurkan derajat para wanita dan emansipasi sendiri kehilangan maknanya.

Di era globalisasi seperti saat ini kebudayaan Barat telah masuk dalam berbagai aspek kehidupan, peradaban pun telah mengarah ke Barat. Globalisasi tentu saja berdampak pada pola pemikiran serta pola kehidupan masyarakat Indonesia. Kaum wanita diarahkan dalam kehidupan yang bermewah-mewah karena tuntutan zaman, sebagian besar masyarakat dimanjakan dengan kecanggihan alat-alat elektronik masa kini. Hingga trend menjadi kebutuhan masyarakat khususnya wanita, kemudian mereka diarahkan dalam kehidupan yang lebih hedonis, serta dampak lainnya seperti menjadi manusia yang anti social karena mementingkan kehidupannya sendiri, serta mengarahkan wanita dalam gaya hidup lebih matrealistis karena dituntut untuk bermewah-mewah.

Gaya hidup wanita di era globalisasi seperti ini, sebagian besar wanita tidak memahami peran dan posisinya dalam masyarakat, ada juga yang lupa akan sejarah perjuangan wanita, ada pula wanita yang hidup dengan kebebasan yang seluas-luasnya. Tak jarang mereka para wanita juga melupakan aturan-aturan dalam masyarakat meskipun tidak tertulis.

Tidak hanya dalam kehidupan masyarakat secara luas, dalam ruang lingkup kehidupan wanita yang menyandang gelar sebagai mahasiswi juga tidak jauh berbeda dengan pola kehidupan masyarakat secara umum. Masih banyak

mahasiswi yang apatis terhadap permasalahan-permasalahan di lingkungan sekitar atau yang biasa kita sebut dengan mahasiswi anti social. Selain itu ada pula mahasiswi yang kuliah karena terinspirasi dengan film drama yang bermewah-mewah, senang-senang, dan jalan-jalan sehingga perkuliahan hanya dijadikan sebuah status. Padahal dahulu untuk pendidikan yang setara, bebas, dan setingggi- tingginya untuk wanita di perjuangkan dengan susah payah oleh pejuang emansipasi wanita.

Era globalisasi seperti saat ini, ada juga wanita dengan gelar mahasiswi yang semakin memanjakan media social, padahal dengan memanjakan media social tanpa henti tentu saja secara otomatis akan menyita waktu seorang penggunanya, apalagi pengguna tersebut adalah seorang mahasiswi dimana dalam usia perkuliahan lebih di tuntut untuk produktif. Sehingga dengan memanjakan media social produktifitas mahasiswi akan berkurang, dan dengan keadaan seperti ini akan menjadikan mahasiswi sebagai penonton atas segala kondisi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Berikutnya ada pula mahasiswi yang takut berekspresi, dalam forum kajian keperempuanan misalnya, masih banyak diantara mereka yang takut mengekspresikan dirinya dalam sebuah forum milik bersama tersebut. Kaum wanita yang menyandang gelar mahasiswi merasa belum merdeka meskipun telah ada emansipasi wanita, mereka bagai macan di luar dalam konteks “jalan-jalan” tetapi ketika di forum mereka diibaratkan “putri malu”. *Doxa* yang sering muncul dalam masyarakat dalam hal ini ialah “Tong Kosong”. Wacana tersebut tentu saja dapat menggambarkar kehidupan sebagian besar wanita sebagai mahasiswi, karena dalam perspektif masyarakat, seseorang yang telah menyandang gelar mahasiswa ialah seseorang yang menguasai bidang pendidikannya serta sosialnya. Namun realita yang terjadi terhadap mahasiswa masa kini tidak memahami bidang pendidikannya sendiri yang menjadi focus pendidikan dalam perkuliahan.

Kemudian ada fenomena social yang masih terjadi dalam ruang lingkup kehidupan mahasiswa yaitu menurunnya minat baca mahasiswa. Bagi wanita

yang menjadi seorang mahasiswi tentu saja ini merupakan sebuah masalah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa wanita adalah pendidik atau biasa dikatakan sebagai sekolah pertama untuk anak-anaknya yang disiapkan sebagai generasi emas untuk pembangunan bangsa Indonesia. Dengan rendahnya minat baca maka pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut juga minim dan kemampuan akademik yang dimiliki oleh mahasiswa juga otomatis akan menurun. Menurunnya minat baca mahasiswa tersebut dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh mahasiswa mengenai pentingga membaca, tidak memaknai perannya sendiri sebagai mahasiswa yang sering dikatakan *agen of change* serta *agen of control*. Selain itu mereka para mahasiswa juga kurang memaknai posisi mereka sebagai mahasiswa dan posisinya di dalam masyarakat yang di jelaskan dalam "Tri Dharma Perguruan Tinggi".

Berikutnya faktor yang menurunkan minat baca mahasiswa ialah dalam era globalisasi, dimana semua pengguna media social akan di manjakan dengan kecanggihan alat-alat komunikasi sehingga waktu yang seharusnya di gunakan untuk membaca di alihkan untuk memanjakan fitur- fitur kekinian dalam media social yang pada saat ini telah menjadi candu untuk masyarakat termasuk mahasiswa.

Jika kita bandingkan kembali maka kondisi saat ini lebih baik dari pada kondisi masa lalu. Dimana masa kini para wanita telah memiliki kesempatan untuk bersaing di kancah public maupun domestic, sudah banyak wanita karir di masa kini, dan para ibu rumah tangga juga sudah menguasai berbagai keterampilan. Hal tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh wanita masa kini untuk bersaing dalam berbagai bidang karena tuntutan lapangan pekerjaan. Bukan malah sebaliknya, mereka generasi muda wanita lebih memilih menghabiskan waktu untuk bersenang- senang hingga lupa belajar dan mengarah pada kehidupan yang matrealistis serta hedonis.

Di era globalisasi ini peran wanita tidak hanya dalam keluarga untuk melayani suami dan anak, namun bebas untuk berkiprah dalam kancah public

maupun domestic dengan tetap memperhatikan tugasnya dalam keluarga. Dengan kata lain bahwa wanita masa kini dapat berkontribusi dalam segala bidang kehidupan masyarakat tanpa ada diskriminasi pembagian kerja. Dalam pasal 65 ayat 1 Undang- Undang nomor 12 tahun 2003 mengenai keterwakilan sekurang-kurangnya 30% wanita dalam politik merupakan bentuk nyata untuk perempuan berperan dalam ranah politik.

Globalisasi yang semakin meracuni generasi bangsa, dan tidak sedikit wanita yang terlena dengan kemewahan dan kecanggihan. Kemudian akan mempengaruhi keterwakilan wanita dalam pembangunan bangsa, sehingga tidak ada lagi pembuktian bahwa wanita mampu berdiri membangun bangsa. apabila dibiarkan terus- menerus maka generasi muda wanita bangsa Indonesia akan menjadi generasi yang bimbang, tanpa masa depan yang pasti, tanpa pengetahuan yang luas, apalagi jika di tambah dengan semakin merosotnya moral wanita masa kini. Derajat seorang wanita direndahkan oleh dirinya sendiri, hal ini jauh dari makna emansipasi R.A Kartini untuk meninggikan derajat wanita Indonesia.
Kemudian disusul lagi dengan tuntutan wanita yang merasa di batasi geraknya, masih menuntut kesetaraan, menuntut keadilan gender, dan lain sebagainya. Disamping itu wanita tidak berfikir secara rasional terhadap keadaan. Selalu berteriak emansipasi wanita, tetapi tidak membuktikan dirinya layak untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

C. Tantangan Perempuan di EraGlobalisasi

John Naisbitt dan Patricia Aburdune dalam buku Megatrends 2000 yang diterbitkan pada tahun 1982 meramalkan : “Bahwa perempuan akan mengambil semua peran dalam berbagai lini kehidupan”. Karenanya perbincangan tentang perempuan menjadi menarik, mengingat ramalan itu kini menjadi nyata. Globalisasi menunjukkan adanya peningkatan kemajuan di bidang telekomunikasi, elektronika, dan bioteknologi. Kemajuan ini memberi dampak

pula pada keterlibatan perempuan di sektor ekonomi, politik, dan bidang sosial lainnya.

Keterlibatan perempuan yang semakin besar pada sektor publik, tentu saja merupakan kemajuan. Hanya saja globalisas membawa konsekwensi bagi kehidupan perempuan. Bagi mereka yang berstatus single, situasi ini memberi ruang yang selebar-lebarnya untuk mengaktualisasikan diri. Meraih cita, mengukir prestasi adalah hal utama yang ingin diwujudkan. Ukuran sukses ditandai dengan adanya posisi yang mapan dan prestise. memiliki gaji yang besar, jaringan kerja internasional, jam kerja yang semakin padat.

Namun bagi perempuan berstatus ibu rumah tangga. Kencenderungan untuk eksis di sektor publik, menjadi semacam dilema. Terkait dengan posisi mereka sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga. Posisi ini mengharuskan mereka untuk berperan di sektor domestik, sementara mereka umumnya bekerja dan berkarir di sektor publik Menjaga keseimbangan antara sektor domestik dan publik menjadi sulit, manakala globalisasi menggiring mereka semakin eksis di sektor publik.

Makalah ini menyoroti bagaimana perempuan bisa berperan di sektor publik, tanpa mengabaikan sektor domestik. Apa saja tantangan yang akan dihadapi dalam mewujudkan keseimbangan tersebut. Serta solusi apa yang bisa dilakukan dalam menjawab tantangan tersebut.

Pengertian Globalisasi

Globalisasi berasal dari kata “global” yang bermakna universal. Istilah ini memiliki pengertian yang berhubungan dengan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia, di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer dan bentuk-bentuk interaksi lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Adanya globalisasi memberi dampak yang signifikan bagi perkembangan umat manusia, khususnya perempuan.

Dalam globalisasi setiap bangsa/negara berlomba melakukan pembangunan. Semua negara melakukan kapitalisasi dan ekspansi utamanya di

bidang industri, teknologi dan komunikasi. Proses komersialisasi berlangsung di semua bidang. Kehidupan manusia cenderung individualis dan materialistik. Kesuksesan hidup diukur dari sebesar apa materi yang ia punyai (uang, rumah, tanah, jabatan , investasi, dsb)

Perempuan dan Globalisasi

Sejak Kartini memperjuangkan kedudukan perempuan setara dengan kaum lelaki, maka sejak itu emansipasi bergulir. Emansipasi adalah satu gerakan yang dimaksud agar perempuan memiliki kedudukan dan setara dengan kaum lelaki. Artinya setara dalam kehidupan di sektor publik dan sektor domestik. Pada zaman Kartini yang diperjuangkan adalah perempuan memperoleh pendidikan setara dengan laki-laki. Ia berpendapat pendidikan perempuan merupakan hal penting untuk mengangkat derajat bangsanya, karena ibu-ibu yang terdidik akan bisa membesarkan anak mereka dengan lebih baik.

Berpuluh tahun kemudian emansipasi telah merasuki tatanan masyarakat, bukan saja di bidang pendidikan tetapi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial lainnya. Dan kini di era globalisasi perempuan Indonesia sama majunya dengan perempuan di negara lain. Banyak perempuan telah menduduki posisi penting di berbagai bidang. Keunggulan perempuan dalam menduduki posisi penting mendapat pengakuan oleh Marie C. Wilson : *"The core what woman bring to leadership- a tendency toward inclusiveness, emphaty, communication up and down hierarchis, focus on broader issues and reacher bussiness"* . Hal ini semakin dikuatkan pula oleh Thomas J. Reters mengatakan : " *woman as more relational, less conscious of hierarchy, better listener and more able to avoid the agression men can sometimes bring to management"*

Tantangan Perempuan di Era Globalisasi

Meskipun perempuan memiliki keunggulan, namun eksistensi perempuan di ranah publik menghadapi tantangan beberapa hal berikut :

Sindrom Cinderella Complex : adalah sindrom yang dikemukakan oleh Collete Dowling yaitu suatu rasa takut yang begitu mencekam, sehingga perempuan merasa tidak berani dan tidak bisa memanfaatkan potensi otak dan daya kreatifitasnya secara penuh. Perempuan merasa takut menjadi terkenal, sukses, dan menempati posisi penting, karena merasa harus berperan di sektor domestik, dengan alasan agama, budaya, dsb. Banyak perempuan mengalami sindrom ini, dan mengambil keputusan untuk bekerja dan berkarir seadanya, padahal ia memiliki potensi yang amat besar.

Dukungan institusi yang belum maksimal : maksud dukungan institusi disini adalah institusi keluarga, masyarakat, perusahaan, dan pemerintahan. Meskipun pola pikir masyarakat sudah berkembang tetapi masih di temui pola pikir belum maju, dan berakibat pada dukungan institusi yang delum maksimal. Misalnya : institusi keluarga, dimana ayah, ibu, suami, mertua, dsb memiliki pola pikir yang menghambat perempuan aktif di dektor publik. Atau perusahaan yang beranggapan bahwa perempuan hanya boleh menempati posisi tertentu saja.

Pergeseran nilai dalam kehidupan : era globalisasi memberi pengaruh bergesernya nilai yang dianut oleh masyarakat. Nilai sukses diukur dari sisi materi seperti : uang , rumah jabatan, kepopuleran. Situasi ini membuat perempuan banyak mengejar simbol-simbol tersebut. Perempuan terjebak untuk bekerja terus menerus dan sangat keras (menjadi sangat maskulin). Cenderung meninggalkan femininitasnya. Dengan demikian, pelan dan pasti perempuan digiring mencapai ambisi, menjadi semakin individual dan cenderung mengabaikan nilai kebersamaan.

Dalam konteks perempuan muslim , kondisi di atas sering dialami oleh perempuan berkeluarga. Bagi perempuan yang masih sendiri, cenderung lebih aman dan dan dapat berekspresi dengan bebas. Apa saja solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut. Beberapa solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

Mewujudkan adanya persamaan dan keragaman (*equality in diversity*) dikemukakan oleh Vandana Shiva aktifis dari India : yaitu sebuah konsep dimana perempuan tetap memerankan kualitas feminin yang baik. Bahwa kualitas pengasuhan, pemeliharaan dan cinta adalah fitrah perempuan dimana ia berhak untuk mengaktualisasikan dimanapun ia berada termasuk apabila ia berada di dunia publik (maskulin) . Maka yang menjadi ukuran kehebatan perempuan dengan memakai standar maskulin (uang, status, kekuasaan) adalah tidak relevan. Apabila situasi dan kondisi mengharuskan perempuan berkiprah di dunia publik (maskulin) , maka diharapkan aktualisasi kualitas femininya diharapkan dapat memberi warna tersendiri bahwa kebersamaan, saling peduli, dan memilihara kesatuan dapat memberikan kepuasan hakiki .

Penentuan Skala Prioritas dalam jenjang Kehidupan Perempuan : Bahwa perempuan muslim pada masa ia masih sendiri, bebas memilih prioritasnya untuk mengekspresikan apa yang menjadi angan dan cita-citanya. Mengerahkan semua potensi kecerdasan inteletual dan kecerdasan emosi untuk meraih sukses. Pada posisi ini, perempuan memiliki posisi tawar yang besar untuk menentukan semua agenda. Oleh sebab itu perempuan muslim diharapkan dapat memanfaatkan masa emas ini untuk mengeksplore dirinya seluas-luasnya. Menjawab semua tantangan dan melakukan kerja yang bermanfaat, bagi diri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Pada masa berkeluarga, skala prioritas itu mengalami perubahan, bukan lagi untuk diri sendiri, melainkan untuk suami dan anak. Perempuan harus berdamai, menghantarkan anak dan suami ke satu titik dimana mereka bisa mandiri mengelola diri tanpa bantuan perempuan sepenuhnya.. Apabila sudah mencapai situasi ini maka perempuan boleh mengembangkan diri secara maksimal kembali.

Membentengi diri dengan nilai mulia : menjalani kehidupan sebagai perempuan di era globalisasi. Nilai mulia itu terdapat dalam nuansa religi, dan tradisi hidup masyarakat Indonesia. Kita sepatutnya bersyukur dibesarkan di satu negara yang mengagungkan nilai kesopanan, kejujuran, kebersamaan dalam

agama dan tradisi yang kita anut. Nilai ini tidak boleh hilang, harus tetap dijaga dan dikembangkan agar dapat menjadi benteng di tengah melunturnya nilai di era gobalisasi.

Era globalisasi membawa perubahan dalam semua aspek kehidupan. Perempuan sebagai elemen penting dan menentukan harus tetap mengambil peran di era ini, tanpa meninggalkan sisi feminitasnya. Semoga perempuan muslim dapat menjawab tantangan globalisasi , menjadi contoh teladan , memberi manfaat bagi orang di sekitarnya

D. REVOLUSI Industri 4.0

Sedang berlangsung saat ini telah mengubah kehidupan manusia melalui berbagai teknologi internet of things. Digitalisasi teknologi tak dapat dibendung dan begitu cepat memengaruhi berbagai bidang kehidupan. Tidak hanya pengembangan perangkat atau sistem untuk menjalani tranformasi digital, tapi juga sumber daya manusia (SDM).

Menurut UN Women, dalam dunia yang sedang berubah ini, 90 persen pekerjaan di masa depan akan menggunakan keterampilan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pekerjaan dengan cara lama akan berganti dengan berbasis teknologi informasi. Tidak dapat dipungkiri perempuan memegang peranan yang signifikan dalam era ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, nilai sex ratio Indonesia sebesar 101,0 artinya hampir setengah penduduk Indonesia adalah perempuan sehingga peran perempuan menjadi modal pembangunan yang sangat potensial. Berdasarkan Arif (2015), peran SDM perempuan yang berkualitas paling tidak memiliki dampak pada dua hal.

Pertama, dengan kualitas yang dimiliki, perempuan akan menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Kedua, perempuan yang

berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan SDM di masa datang.

Kesetaraan gender masih menjadi isu penting dalam pembangunan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pandangan bahwa semua orang menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin mereka. Hal ini diduga masih ditemukannya diskriminasi perempuan dalam berbagai lini kehidupan yang tak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi di berbagai belahan bumi.

UNFPA menyebutkan kesetaraan gender dapat memajukan pembangunan dan mengurangi kemiskinan (UNFPA, 2018). Menurut *European Institute for Gender Equality* (EIGE), peningkatan kualitas kesetaraan gender berdampak positif baik secara individual mau pun masyarakat luas. Secara ekonomi, kesetaraan gender dapat mendorong peningkatan PDB perkapita dan perluasan lapangan kerja yang dalam jangka panjang akan berdampak pada pengentasan kemiskinan (EIGE, 2017).

KPPPA (2017) mengungkapkan kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, dan mengurangi kemiskinan. Menteri keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kalau ingin ekonomi tumbuh, satu-satunya sumber yang bisa dioptimalkan dalam society-nya adalah perempuan. Penelitian lain mengungkapkan, jika ketimpangan gender dapat secara penuh dihilangkan, pendapatan agregat dapat meningkat sekitar 6,6 hingga 14,5 persen dari target ekonomi. Selain itu, pendapatan perkapita juga akan meningkat 30,6 hingga 71,1 persen.

Maka mempromosikan kesetaraan gender, bagian utama dari strategi pembangunan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka (World Bank, 2000).

Dalam mengatasi masalah tersebut, pembangunan perempuan harus dilakukan dengan tepat sasaran. Harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung data yang akurat sehingga indikator pembangunan perempuan yang masih

rendah dapat digenjot untuk mencapai hasil yang maksimal. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi indeks yang dapat menggambarkan pembangunan manusia berbasis gender.

Pembangunan Manusia Indonesia menurut kesetaraan gender menunjukkan tren perbaikan. Data BPS tercatat angka IPG Indonesia pada 2018 berada di level 90,99 dari skala 0-100. Indeks tersebut naik 0,03 poin dari tahun sebelumnya. Sebagai informasi, IPG mendekati 100 mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Membaiknya IDG menunjukkan perempuan Indonesia semakin menunjukkan perannya dalam pembangunan. Ini terbukti sebanyak 17,32 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen, sebanyak 47,02 persen dalam kepemimpinan profesional serta 36,70 persen sumbangan pendapatan perempuan.

Meski pun IDG mengalami kenaikan, namun Indeks Pembangunan Manusia perempuan Indonesia 2018 masih berada di level 68,63. Tertinggal dari IPM lelaki yang berada di posisi 75,43. Ini yang membuat IPG Indonesia masih berada di bawah 100.

IPM perempuan rendah salah satunya disebabkan karena faktor pendidikan. Data BPS menunjukkan rata-rata lama sekolah perempuan di 2018 hanya 8,26 artinya rata-rata perempuan Indonesia hanya berpendidikan sampai kelas delapan atau kelas dua SMP.

Sementara lama sekolah laki-laki 8,90 tahun artinya rata-rata laki-laki berpendidikan sampai kelas sembilan atau kelas tiga SMP. Kondisi ini menyebabkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang masih jauh di bawah laki-laki. TPAK menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dan dihitung dari jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas dikali 100. Berdasarkan data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) pada Agustus 2018, TPAK perempuan 51,88 lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 82,69.

Kondisi ini menjadikan tantangan yang harus dihadapi perempuan sebagai dampak dari Revolusi Industri 4.0. Melek digital bagi perempuan harus dijadikan prioritas, karena permintaan terhadap tenaga kerja berliterasi digital di Indonesia terbilang sangat tinggi. Perusahaan-perusahaan rintisan yang banyak bermunculan serta semakin beragamnya layanan teknologi digital yang digunakan oleh perusahaan menciptakan kebutuhan akan tenaga kerja yang melek digital. Berdasarkan data BPS, persentase pengguna internet perempuan pada 2018 hanya sebesar 37,49 persen sedangkan pengguna laki-laki mencapai 42,31 persen

2. KETIDAKADILAN GENDER

A. Ketidakadilan Gender

Sebenarnya perbedaan gender dengan pembedaan sifat, peran dan posisi sebagaimana yang dikemukakan di depan tidaklah menjadi masalah sepanjang ADIL. Namun dalam kehidupan nyata, perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan. Ketidakadilan gender tidak saja berlaku bagi perempuan, tetapi juga berlaku bagi laki-laki.

Menurut Fakih (1998), ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut. Mosse (1996), Irohmi (1990), mengatakan bahwa ketidakadilan gender terutama dialami perempuan. Sebagai gambaran laki-laki diakui dan dikukuhkan untuk menguasai perempuan. Kemudian hubungan perempuan dan laki-laki yang hirarkis, dianggap sudah benar dan diterima sebagai hal yang normal. Ketidakadilan gender tersebut terdapat dalam berbagai wilayah kehidupan, yaitu dalam wilayah negara, masyarakat, gereja, organisasi atau tempat kerja, keluarga dan diri sendiri (Nunuk P. Murniaty, 2000).

Dalam pengertian positif yang ingin dicapai adalah KEADILAN GENDER. Keadilan gender adalah proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Agar proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki. Untuk mencapai keadilan gender diperlukan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki secara berbeda. Oleh karena itu, keadilan gender tidak berfokus pada perlakuan yang sama tetapi lebih mementingkan pada kesetaraan sebagai hasilnya.

B. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender tersebut dapat berbentuk Subordinasi, Marginalisasi, Stereotip, Kekerasan terhadap perempuan dan Beban kerja ganda dan panjang. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut saling terkait dan berpengaruh satu dengan lainnya.

a. **Subordinasi:** artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih utama atau lebih penting dari yang lain. Dengan kata lain sebuah posisi atau peran yang merendahkan nilai peran yang lain. Salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting, utama, dan tinggi dibandingkan jenis kelamin lainnya. Misalnya laki-laki sebagai kepala pemimpin. Perempuan Kupang tidak perlu sekolah tinggi-tinggi sebab nanti akan bertugas di dapur, melayani suami, keluarga dan urus anak. Sejak kecil anak perempuan dididik untuk mengurus rumah tangga, memelihara anak, menenun dan menegaskan peran anak laki-laki sebagai kepala keluarga, pengambil keputusan, dan penerus marga dan mampu melaksanakan pekerjaan yang berat dan bernilai tinggi. Indikasi bahwa perempuan tersubordinasi dapat dilihat dari contoh- contoh berikut ini:

    - Masih sedikitnya perempuan yang bekerja dalam pengambilan keputusan dan menduduki peran penentu kebijakan.
    - Adanya status perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pekerjaan reproduktif sebagai pekerjaan rendah dan merupakan tanggung jawab perempuan.
    - Kontribusi perempuan, yang umumnya melakukan pekerjaan domestik, pengasuhan anak, pertanian subsisten, pekerjaan pengelolaan komunitas dan pekerjaan-pekerjaan sektor informal

tidak diperhitungkan dalam Produk Dimestik Bruto.

b. **Marjinalisasi (Peminggiran**): artinya suatu proses peminggiran atau menggeserkan kepinggir. Proses peminggiran mengakibatkan proses pemiskinan. Misalnya perempuan dianggap lemah, sabar, teliti maka anak perempuan diarahkan sekolah guru, perawat, sekretaris. Ironisnya pekerjaan-pekerjaan tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan lain yang bersifat maskulin. Indikasi bahwa perempuan termarjinalisasi dapat dilihat dari contoh-contoh berikut ini:

- Kerja perempuan dalam rumah tangga tidak dinilai/diperhitungkan.
- Perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi, pemanfaatan waktu dan pengambilan keputusan. Kalaupun memiliki akses perempuan tidak memiliki kontrol terhadap sumber daya tersebut.
- Perempuan tidak memiliki kesempatan yang luas dalam mengembangkan karier dan diberikan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

C. Kebutuhan Gender

Kebutuhan gender adalah kebutuhan yang lahir akibat adanya perbedaan gender yang menyebabkan perbedaan peran, pembagian kerja, perbedaan akan akses, adanya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan baik dalam konteks peran reproduktif, peran produktif dan peran sosial kemasyarakatan menyebabkan adanya kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan akses antara perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya yang ada juga menimbulkan kondisi yang melahirkan

kebutuhan yang berbeda antar laki-laki dan perempuan. Relasi gender antara perempuan dan laki-laki juga melahirkan berbagai kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Kebutuhan tersebut berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, peran gender yang berbeda dapat melahirkan kondisi kesehatan, pendidikan, perekonomian dan lain-lain yang berbeda antar perempuan dan laki-laki. Ketika perempuan dianggap lebih *care* dan pantas bergerak di dalam domain rumah, peluang mengikuti pendidikannya menjadi tidak terlalu diperhatikan. Sebagai akibatnya kondisi pendidikannya tidak menguntungkan, seperti tingkat pendidikan perempuan rendah, kesempatan kerja berkurang, peluang menempati posisi strategis kecil, pendapatannya lebih kecil dibandingkan laki-laki, dan sebagainya. Kondisi seperti ini melahirkan kebutuhan tersendiri dan berbeda akan pendidikan pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

D. Jenis-Jenis Kebutuhan Gender.

Kebutuhan gender dapat dibedakan atas kebutuhan praktis (*Pratical Gender Needs*) dan kebutuhan strategis (*Strategic Gender Interests*). Kebutuhan gender praktis merespon pada kebutuhan yang dirasakan sesegera mungkin dalam konteks yang spesifik dan jangka pendek. Menurut Bhasin (2000, 64), *Pratical Gender Needs (PGNs) are related to the condition of women, there are easily identifiable and they are related to the existing gender division of labour.* Kebutuhan ini tidak mempermasalahkan relasi kuasa gender atau posisi perempuan yang timpang. Pemenuhan kebutuhan praktis ini lebih melestarikan peran reproduksi perempuan yang berkaitan dengan pemeliharaan rumah tangga, pendidikan anak, penyediaan air, penyediaan sarana kesehatan reproduksi, peluang meningkatkan pendapatan dalam rumah tangga dan lain-lain. Secara

umum kebutuhan praktis adalah kebutuhan dasar atau untuk bertahan hidup.

Kebutuhan gender strategis merespon kepada kebutuhan jangka panjang yang berkaitan erat dengan keputusan laki-laki dan perempuan untuk menyetarakan posisi dan status mereka dalam masyarakat. Kebutuhan gender strategis terkait dengan : *womens subordinate position in society and their desire to change the existing hierarchical gender relations and make them more equal (Bhasin, 2000,64).* Kebutuhan ini mempermasalahkan relasi kuasa atau posisi timpang antara perempuan dan laki-laki dalam hal pembagian kerja, kontrol terhadap sumber daya, kekerasan. upah, hak-hak sosial, ekonomi dan hukum.
Pemenuhan kebutuhan strategis antara lain melalui pendidikan, pemberdayaan, peningkatan ketrampilan kepemimpinan dan management dsb. Diakui aktivas terkait dengan pemenuhan kebutuhan gender strategis seringkali menemui banyak tantangan karena ***male*** *domination,* dan tuntutan perubahan relasi gender jangka panjang. Secara umum kebutuhan strategis adalah kebutuhan untuk kesetaraan dan pemberdayaan laki-laki maupun perempuan.

Perempuan tidak mendapatkan dorongan atau setidaknya kebebasan kultural dan politik untuk memilih kariernya mendapatkan sanksi sosial jika pekerjaannya tidak menyentuh pekerjaan domestik. Perempuan tidak mendapat kesempatan sama masuk ke lapangan pekerjaan apapun dan dimanapun karena dibatasi oleh kemampuan reproduksinya. Perempuan tidak setara dengan laki-laki di depan hukum dalam hal memperoleh waris, harta gono gini dan sejenisnya.

Beban ganda adalah beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya Masuknya perempuan di sektor publik tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga. Peran ganda yang tetap harus dijalankan baik di domain publik maupun domestik. Akibat dari pembedaan sifat dan peran, maka semua pekerjaan

domestik dibebankan kepada Perempuan. Tuntutan ekonomi keluarga selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, perempuan juga harus bekerja di kebun, ke pasar mencari nafkah bagi keluarga. Perempuan masuk ke dunia publik akan tetapi beban domestiknya tidak berkurang. Akibatnya perempuan memikul beban kerja ganda; bahkan sering dituduh mengabaikan tanggung jawab di dalam rumah tangga dan juga tidak berprestasi di dunia publik. Ketidakadilan nampak ketika sekalipun curahan tenaga kerja dan waktu cukup panjang ternyata dihargai rendah dibandingkan pekerjaan pubrik.

3. Pemahaman Gender

A. Kodrat dan non kodrat

Kata gender sudah sangat populer di Indonesia termasuk di NTT, walaupun artinya masih kabur, karena di dalam kamus tidak terdapat penjelasan yang tepat, bahkan diartikan pula sebagai seks/jenis kelamin. Secara mendasar gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin. Setiap manusia pasti mempunyai jenis kelamin, perempuan atau laki-laki. Coba bayangkan ketika seorang ibu melahirkan, mama dukun atau ibu bidan atau dokter langsung kenal jenis kelamin bayi yang baru dilahirkan melalui penampakan ciri biologisnya. Jika bayi memiliki vagina maka ia disebut perempuan dan jika ia memiliki penis maka ia disebut laki-laki. Inilah yang dikenal sebagai KODRAT.

Mengapa ciri biologis itu disebut Kodrat adalah suatu ketentuan yang datang dari Tuhan. Lebih jelas lagi Kodrat adalah sifat bawaan biologis sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak dapat berubah sepanjang masa dan tidak dapat dipertukarkan dan melekat pada perempuan dan laki-laki. Jenis kelamin tidak dapat berubah, bersifat tetap dan abadi. Di mana-mana didunia ini baik

perempuan Amerika, Belanda, Irak, Arab, Indonesia, NTT, Sabu maupun perempuan Amarasi, pasti memiliki vagina. Demikian pula laki-laki suku apa saja, hidup dizaman tempo dulu maupun di abad 21 pasti mempunyai penis. Di mana-mana di dunia ini jika mencapai usia remaja maka ia akan mengalami haid/menstruasi. Itulah kodrat perempuan yang tidak dapat dihindari suku apapun, status sosial apapun, agama apapun tak peduli latar belakang kehidupannya. Demikian pula laki-laki ketika memasuki masa remaja, ia akan mengalami mimpi basah. Alat kelamin manusia (biologis) lengkap bersama fungsi-fungsinya bersifat abadi, tidak berubah berdasarkan waktu, tempat, suku, latarbelakang pendidikan, agama, ekonomi dll. Secara lebih rinci, ciri-ciri yang bersifat fisik perempuan: a) Organ reproduksi (Payu darah untuk menyusui, vagina, ovum dan rahim), Hormon estrogen-progesteron, kromosom (XX). b) Kulit, suara, dan pertumbuhan payudara. Ciri-ciri yang bersifat fisik biologis laki-laki: a). Organ reproduksi (sperma, testes, kumis), hormonendrogen-testoteron, kromosom (XY). b). Otot, kulit, suara dan pertumbuhan kumis.

Tidak semua perbedaan antara perempuan dan laki-laki merupakan perbedaan biologis yang bersifat kodrat atau yang berasal dari Tuhan. Terdapat pula perbedaan yang bersifat non kodrat yaitu suatu ketentuan yang datang atas ciptaan manusia. Sebagai contoh ketika seorang ibu dipulau Sabu melahirkan seorang bayi, maka mama dukun atau ibu bidan mengumumkan kepada saudara-saudara yang sedang menunggu kelahiran bayi: Wah kita beruntung lahir seorang yang akan " memasak gula ", berarti yang lahir adalah seorang bayi perempuan.

Sedangkan bagi seorang bayi yang berjenis kelamin laki-laki, biasanya mama dukun mengatakan " Tukang iris tuak sudah datang ". Atau dapat pula bagi bayi perempuan, di sapah dengan "Tukang tenun sudah datang". Ini salah satu contoh peran non-kodrat dari suku Sabu, dan tentunya setiap suku/ masyarakat

membedakan sifat, peran dan status kepada perempuan dan laki-laki berbeda-beda.

Di samping dibedakan menurut jenis kelamin kenyataan juga memperlihatkan bahwa di semua masyarakat ada interpretasi budaya bagi makluk manusia yang lahir dengan jenis kelamin perempuan dan lahir dengan jenis kelamin laki- laki. Budaya menanamkan citra pada apa yang disebut perempuan dan apa yang disebut laki-laki. Budaya juga memberikan sifat, peran, dan status yang berbeda kepada ke dua jenis kelamin ini serta mengatur hubungan ke duanya.

Misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut,cantik, emosional, keibuan, pengikut dan bertugas di dunia domestik. Sementara laki-laki dianggap kuat, gagah, jantan, perkasa, rasional, pemimpin dan bertugas didunia publik. Ciri dan sifat tersebut dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang lemah, emosional, sementara ada perempuan yang kuat, dan rasional. Ciri-ciri yang diberikan oleh manusia tidak abadi, tidak berlaku umum, dapat berubah, dapat dipertukarkan, tergantung musim, tergantung budaya, berbeda antara satu kelas dengan kelas lain. Konstruksi budaya terhadap perempuan dan laki seperti ini disebut Gender.

B. Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender

Pentingnya memahami perbedaan seks dan gender adalah karena konsep seks/jenis kelamin biologis yang sifatnya permanen dan statis itu tidak dapat digunakan sebagai alat analisis yang berguna untuk memahami realitas kehidupan dan dinamika perubahan relasi laki-laki dan perempuan. Di lain pihak alat analisis sosial yang telah ada seperti analisis kelas, analisis diskursus dan analisis kebudayaan yang selama ini digunakan untuk memahami relasi sosial tidak dapat

menangkap realitas adanya relasi kekuasaan yang didasarkan pada relasi gender dan sangat berpotensi menumbuhkan penindasan dan ketidakadilan serta ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki

Melalui pembedaan seks dan gender dengan mudah menangkap konsep gender. Gender dikonstruksikan secara sosial sehingga dapat juga

disebut sebagai jenis kelamin sosial sedangkan seks lebih dikenal dengan istilah jenis kelamin biologis.

Tabel 1. Perbedaan Karakteristik Jenis Kelamin antara Laki-laki dan Perempuan

Jenis Kelamin/Seks	**Perempuan**	**Laki-Laki**
Karakteristik fisik melekat pada masing-masing jenis kelamin	- Rahim - Vagina - Payudara	- Penis - Testis - Jakun
Karakteristik bawaan bersifat fungsional yang diturunkan, permanent dan tidak dapat berubah	- Haid - Mengandung - Melahirkan - Menyusui	- Menghamili - Mimpi basah
Karakteristik biologis alamiah	- Kromosom XX - Hormon dominan progesteron	- Kromosom XY - Hormon dominan androgen/ testosteron

Tabel 2. Pembedaan antara Perempuan dan Laki-laki Yang Dikonstruksikan Oleh Masyarakat

Gender (Sosial)	Perempuan	Laki-laki
Stereotype	Feminim	Maskulin
Pembagian kerja secara gender	Kerja Feminim	Kerja Maskulin
Ruang lingkup	Domestik Privat	Luar Ranah Publik
Fungsi / Watak kerja	Reproduktif	Produktif
Tanggung j awab	Nafkah tambahan	Nafkah Utama
Sifat / Karakter	Lemah lembut Penurut Emosional Tidak pintar / irasional Pasif	Kuat Rasional Aktif ambil Keputusan/ Memimpin
Citra (Tampilan)	Subordinat (Dikuasai)	Superordinat (Menguasai)

Jadi jelas bahwa jenis kelamin atau seks adalah perbedaan biologis hormonal dan anatomis yang telah ditentukan oleh Tuhan, antara perempuan dan laki-laki. Seks merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis oleh Tuhan dan melekat pada jenis kelamin tertentu. Seks tidak bisa berubah, permanen dan tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan karenanya bersifat mutlak. Misalnya perempuan memiliki vagina, rahim, saluran melahirkan, indung telur dan alat menyususi sedangkan laki-laki memiliki penis, jakala, dan sperma.

Tidak pernah mungkin seorang suami (laki-laki) mengatakan tahun depan saya inginkan agar rahim isteri saya pindah kedalam tubuh saya agar saya dapat menstruasi, hamil dan melahirkan. Sedangkan gender adalah perbedaan antara

laki-laki dan perempuan dalam hal sifat, peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh masyarakat karenanya bersifat relatif, dapat berubah dan dapat dipertukarkan. Gender merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, atau ada pula mengartikan sebagai bagian peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang ditetapkan masyarakat maupun budaya disosialisasikan melalui sejarah yang sangat panjang dan melalui kesepakatan sosial, bahkan tidak jarang melalui proses dominasi. Artinya, proses sosialisasi konsep gender kadang dilakukan dengan cara halus maupun dalam bentuk indoktrinasi.

Proses itu menuntut setiap orang perempuan dan laki-laki berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial budaya di mana mereka tinggal, namun dapat berubah/dipertukarkan karena tidak memiliki hubungan dengan fungsi dan struktur tubuh sebagai perempuan dan sebagai laki-laki Misalnya tidak semua laki-laki rasional, tegas, tidak semua laki-laki pencari nafkah utama, demikian pula banyak perempuan yang rasional, tegas dan sukses sebagai pemimpin. Perubahan ciri dan sifat sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada struktur sosial tertentu, berlaku norma sosial dimana perempuan sebagai kaum yang pantas untuk mengurus anak, dan bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga sedangkan laki-laki diperankan sebagai kaum yang pantas dan berkewajiban bekerja mencari nafkah diluar rumah. Kondisi yang sebaliknya bisa terjadi pada struktur sosial yang lain, di mana perempuan dianggap lebih efektif untuk bekerja dan mencari nafkah diluar rumah, sedangkan laki-laki berkewajiban untuk menjaga, melindungi anak-anak di rumah. Kenyataan, norma-norma sosial yang berlaku di daerah melekat paten pada persepsi masyarakat membuat seorang perempuan dan laki-laki merasa tidak pantas apabila keluar dari ketentuan sosial yang mengatur sifat, peran dan

tanggung jawabnya. Pandangan ini telah dibakukan dan dianggap sebagai kodrat yang merupakan ciptaan Tuhan.

Sesungguhnya selama pandangan tersebut tidak mengarahkan pada hubungan yang timpang atau tidal adil, tidak menjadi masalah. Namun ternyata pembedaan gender menciptakan ketidakadilan dan

ketidaksetaraan baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Kondisi ini, apabila tidak dicari jalan keluar, akan menjadi gap dan terjadi tindakan yang merugikan perempuan dan juga laki-laki.

C. Pengertian Gender

Istilah Gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (l968), untuk memisahkan pencirian yang berasal dari Tuhan (kodrat) dan pencirian yang berasal dari manusia *(Non kodrat*). Kemudian Ann Oakley (l985) mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. Berdasarkan uraian tentang Kodrat dan non kodrat, jenis kelamin dan gender, mempermudah menarik pengertian Gender.
Lebih jelas berikut ini dikutip beberapa pengertian gender:

Gender adalah perbedaan peran, perilaku laki-laki perempuan oleh sosial budaya melalui interpretrasi terhadap perbedaan biologi (Brett, l991)

Gender adalah sifat, peran dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial budaya (Moser, l993)

Gender adalah ciri yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dengan mengkaitkannya pada ciri biologis masing-masing jenis kelamin. (Saptari dan Holzner, l997).

Gender adalah pembedaan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksi oleh masyarakat dan dapatberubah sesuai dengan perkembangan zaman. (Kementerian Negara PP dan UNFPA, 2005).

Gender merujuk pada arti sosial bagaimana menjadi perempuan atau laki-laki sebagai hasil dari cara dibesarkan; diajari berperilaku; dan diharapkan untuk berperan menjadi perempuan dan menjadi laki-laki menurut budaya masyarakatnya (Menkeu RI, 2009)

Gender mengacu pada peran dan tanggung jawab lelaki dan perempuan yang diciptakan didalam keluarga, masyarakat, dan kebudayaan (Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal, Depdiknas, 2008)

Dari pengertian gender tersebut, beberapa hal inti yang dapat disari bahwa gender, dikonstruksi oleh manusia; bersifat dinamis karena budaya masyarakat beragam dan berubah terkait dengan suku bangsa, kelas sosial-ekonomi, usia, zaman, situasi kritis; bukan ciptaan Tuhan dan karenanya dapat berubah/dipertukarkan.

D. PERAN GENDER

Gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat karena jenis kelamin mereka berbeda. Peran-peran tersebut berkaitan dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh ketentuan sosial, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, dan budaya lokal. Artinya, laki-laki dan perempuan harus bersikap dan berperan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Apabila individu-individu tidak melaksanakan peran gendernya sesuai dengan harapan-harapan masyarakat mereka akan mendapat sangsi.

Dengan demikian peran gender tersebut dipengaruhi oleh kelas, etnik, agama, lingkungan sosial, ekonomi, politik dan umur. Peran gender bukan peran kodrati namun masyarakat memberikan peran tersebut pada perempuan dan laki-laki. Sebagai contoh mengasuh, mendidik anak merupakan tanggung jawab perempuan dan mencari nafkah melekat pada laki-laki.

Pengertian Peran Gender

Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya. Peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang dipersepsikan sebagai peran perempuan dan laki-laki.

Peran Produktif

Peran produktif merujuk kepada kegiatan yang menghasilkan barang dan pelayanan untuk konsumsi dan perdagangan (Kamla Bhasin, 2000). Semua

pekerjaan di pabrik, kantor, pertanian dan lainnya yang kategori aktivitasnya dipakai untuk menghitung Produksi Nasional Bruto suatu Negara. Meskipun perempuan dan laki-laki keduanya terlibat di dalam ranah publik lewat aktivitas produktif, namun masyarakat tetap menganggap pencari nafkah adalah laki-laki. Contoh di sebuah kantor, bila terjadi PHK maka seringkali perempuanlah yang dikorbankan karena dianggap kegiatan laki-laki yang menghasilkan uang. Bila merujuk pada definisi kerja sebagai aktivitas yang menghasilkan pendapatan baik dalam bentuk uang maupun barang maka aktivitas perempuan dan laki-laki baik di sektor formal maupun informal, di luar rumah atau di dalam rumah sepanjang menghasilkan uang atau barang termasuk peran produktif. Contoh peran produktif perempuan yang dijalankan di dalam rumah misalahnya usaha menjahit, catering, salon dsb. Contoh peran produktif yang dijalankan di luar rumah, sebagai guru, buruh, pedagang, pengusaha dsb.

Peran Reproduktif

Peran reproduktif dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu biologis dan sosial. Reproduksi biologis merujuk kepada melahirkan seorang manusia baru, sebuah aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan. Reproduksi sosial merujuk kepada semua aktivitas merawat dan mengasuh yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan bertahannya hidup (Kamla Bhasin, 2000). Dengan demikian, aktivitas reproduksi adalah aktivitas yang mereproduksi tenaga kerja manusia. Merawat anak, memasak, memberi makan, mencuci, membersihkan, mengasuh dan aktivitas rumah tangga lainnya masuk ke dalam kategori ini. Walaupun hal-hal tersebut penting untuk bertahannya hidup manusia, aktivitas tersebut tidak dianggap sebagai pekerjaan atau aktivitas ekonomi sehingga tidak terlihat, tidak diakui dan tidak dibayar. Kerja reproduktif biasanya dilakukan oleh perempuan, baik dewasa maupun anak-anak di kawasan ranah domestik.

Pertanyaannya mengapa peran reproduktif secara alamiah menjadi tanggung jawab perempuan. Jawaban yang sering muncul adalah karena perempuan melahirkan maka merawat, memelihara anak menjadi tanggung jawabnya. Pelabelan tersebut menjadi sirna bila mengerti apa itu seks/jenis kelamin dan apa itu gender. Laki-lakipun melakukan peran reproduktif, baik reproduktif biologis (membuahi) dan reproduktif sosial, karena memeliharah anak dan mengasuh anak tidak menggunakan RAHIM .

Peran Sosial (Kemasyarakatan)

Kegiatan kemasyarakatan merujuk kepada semua aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan dan mengorganisasikan kehidupan masyarakat (Kamla Bhasin, 2000). Peran kemasyarakatan yang dijalankan perempuan adalah melakukan aktivitas yang digunakan bersama, misalnya pelayanan kesehatan di posyandu, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kebudayaan (kerja bakti, gotong royong, pembuatan jalan kampung, dll). Semua kegiatan tersebut biiasanya dilakukan secara sukarela/volunteer. Sedangkan peran sosial

yang dilakukan laki-laki biasanya pada tingkatan masyarakat yang diorganisir, misalnya menjadi RT, RW, Kepala desa dsb.

4. KURIKULUM GENDER

A. Pengertian Kurikulum Yang Berwawasan Gender

Di kalangan orang awam, tetapi tidak sedikit juga dari kalangan guru mengartikan kurikulum sebagai “materi” ajaran, yaitu apa yang “diberikan” atau “disampaikan” oleh guru kepada siswa, yang diberikan itu bisa mencakup keseluruhan cakupan isi suatu mata ajaran, bisa juga mengacu ke pokok-pokok bahasan tertentu dari mata ajaran itu. Dekat dengan pengertian ini adalah definisi

bahwa kurikulum adalah daftar mata ajaran. Ada juga yang mengartikan kurikulum sebagai sebuah dokumen berupa GBPP.

Menurut asal katanya kurikulum berasal dari kata bahasa Latin, yang berarti jalur pacu, Anak bersekolah diibaratkan sedang berlari menuju garis finis dengan mata ajaran sebagai jalur pacunya sedangkan garis finisnya adalah ijazah.

Menurut Ronald Doll kurikulum adalah pengalaman, Sementara Mauritz Johnson menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian hasil belajar yang dikehendaki. Ada juga definisi kurikulum yang mencoba merangkum dengan menyebutkan adanya unsur-unsur (a) pengalaman dan jenisnya (berupa pengalaman belajar dari semua jenis), (b) tempat siswa memperoleh pengalaman (di dalam kelas, di luar kelas), (c) tujuan pengalaman dan wataknya, (d) perencanaan, (e) pengorganisasian, (f) pelaksanaan, dan (g) penilaian.

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003; Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam pengertian yang sempit berbicara kurikulum maka yang ada dalam pengertian kita ialah sejumlah mata pelajaran, buku-buku sumber, alat bantu pembelajaran, evaluasi dsb. Namun yang dituntut oleh suatu jenis dan jenjang lebih dari suatu daftar mata pelajaran. Dalam pengertian luas kurikulum berisi semua pengalaman yang harus diterima oleh siswa baik fisik maupun non fisik untuk mencapai tujuan tertentu. Terkait dengan kurikulum yang berwawasan gender adalah kurikulum yang inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, aspirasi peserta didik perempuan dan laki-laki secara seimbang dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan tujuan sekolah/lembaga.

Pengalaman yang akan diperoleh peserta didik baik perempuan maupun

laki-laki tentu ditunjang oleh a). tenaga pendidik yang yang sensitif gender, b) fasilitas belajar yang responsif gender, c). pengelolaan sekolah yang berwawasan gender d) penataan ruang kelas yang responsif gender, e).proses pembelajaran yang responsif gender, f) perencanaan pembelajaran yang responsif gender, g) materi pembelajaran yang responsif gender h).penggunaaan bahasa yang responsif gender dan i) interaksi kelas yang responsif gender (Diadopsi dari Panduan sekolah yang Berwawasan Gender, Direktorat jenderal Pendidikan Nonformal dan informal, 2008). Di jamin pelaksanaan kurikulum yang berwawasan

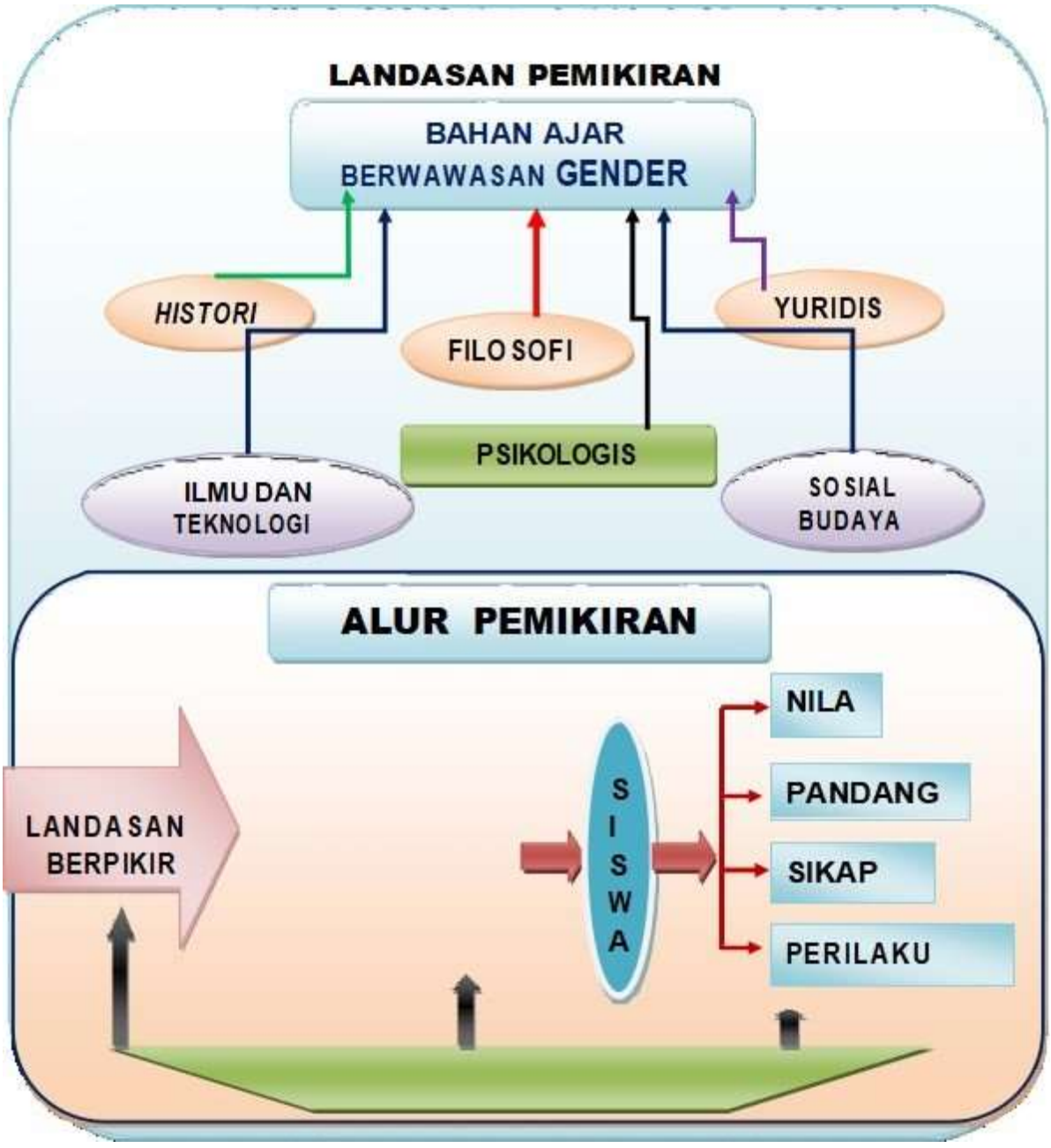
gender dengan penuh tanggung jawab maka peserta didik baik perempuan maupun laki-laki akan mendapat pengalaman belajar yang adil dan setara.

Landasan Kurikulum

Kurikulum merupakan sesuatu yang ditetapkan dengan dasar pemikiran dan pertimbangan dari berbagai sudut. Hal-hal yang dianggap berkaitan dengan dasar atau landasan kurikulum adalah landasan filsafat, masyarakat dan budaya, perkembangan pengetahuan dan ilmu, psikologi, dan tinjauan sejarah.

Menurut John Dewey (1916) kurikulum pada dasarnya adalah segi khusus dari filsafat, sementara filsafat sebenarnya ialah “teori umum pendidikan”. Tinjauan filsafat ini terutama untuk merumuskan tujuan pendidikan, dalam hal ini tujuan jangka panjang. Landasan masyarakat dan kebudayaan berkaitan dengan nilai kebudayaan yang dianut masyarakat. Nilai budaya memberikan unsur pada rumusan tujuan kurikulum. Dengan demikian genderpun turut memberikan unsur dalam merumuskan tujuan Kurikulum. Seyogyanya kesetaraan gender merupakan salah satu aspek yang signifikan dalam meramu dan menyusun kurikulum.

Landasan ilmu dan teknologi berperan dalam penyusunan, peninjauan, perubahan dan pengembangan kurikulum. Ilmu dan teknologi sesungguhnya bebas nilai sehingga dapat mengakomodir kepentingan perempuan dan laki-laki tanpa diskriminatif . Landasan Psikologi mengacu pada psikologi individu (anak) laki-laki dan perempuan menyangkut kemampuan, minat, kebutuhan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan. Landasan sejarah terkait dengan pengembangan lebih lanjut dari kurikulum sebelumnya. Artinya jika kurikulum sebelumnya kurang memperhatikan kesetaraan gender dan berdampak pada hasil/output yang tidak sensitif gender maka kurikulum yang baru tentu tidak mengulang kelemahan kurikulum yang lama.


LANDASAN PEMIKIRAN
BAHAN AJAR
BERWAWASAN GENDER
HISTORI
FILOSOFI
YURIDIS
PSIKOLOGIS
ILMU DAN
TEKNOLOGI
SOSIAL
BUDAYA
ALUR PEMIKIRAN
LANDASAN
BERPIKIR
SISWA
NILA
PANDANG
SIKAP
PERILAKU

B. Pengertian Pengarusutamaan Gender

Konferensi Wanita Sedunia di Beijing 1995, istilah *Gender Mainstreaming (GMS)* tercantum dalam *Beijing platform of action*, yang berarti GMS adalah strategi untuk mengintegrasikan kepentingan gender dalam formulasi dan monitoring kebijakan, program dan proyek. Negara Republik Indonesia yang hadir dalam konferensi tersebut turut sepakat untuk mengimplementasikan di negara masing-masing. Untuk menjadikan kepentingan laki-laki dan perempuan menjadi dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan. pemantauan dan penilaian kebijakan-kebijakan dalam program pembangunan dan upaya untuk mencapai Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG).

Strategi ini sangat diperlukan sehingga Pemerintah mengeluarkan Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Dengan adanya PUG ini Pemerintah dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan kebijakan- kebijakan yaqng responsif gender. Kebijakan dan pelayanan publik serta program perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi seluruh rakyatnya. PUG sebagai strategi merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak laki-laki dan perempuan atas kesempatan, pengakuan dan penghargaan yang sama di masyarakat. PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya (memperkuat kehidupan sosial, politik dan ekonomi bangsa)

Pengertian PUG

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara nasional dan sistimatis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan

dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. (Inpres RI.No.9 tahun 2000). Tidak jauh berbeda dengan pengertian PUG yang dikemukakan oleh *Assosiation for Womens Rights in Development (2004,1): PUG as a strategy which aims to bring about gender equality and advance womens right by infusing gender analysis , womens perspective and gender equality goals into mainstreaming policies, projects and institutions.*

Dasar Hukum PUG

Dasar hukum pelaksanaan PUG di Indonesia. dan NTT

a. UUD1945
b. UAP MPRRI No. IV/MPR/1999
c. UU No.7 Tahun 1984:HAM
d. UU No. 23 Tahun 2002
e. UU No. 23 Tahun 2004:PKDRT
f. INPRES No. 9 Tahun 2000:PUG
g. SK Gubernur NTT No. 8 Tahun 2001: PUG
h. KEPMENDAGRI NO.132 TH 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, untuk melaksanakan PUG yang diperkuat dengan adanya pembiayaan sebesar 5% dari dana APBD Propinsi maupun Kab/Kota.

Keuntungan Menggunakan PUG

Dengan PUG dapat diidentifikasikan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai:

- Akses yang sama terhadap sumberdaya pembangunan.
- Berpartisipasi dalam proses pembangunan termasuk pengambilan keputusan.
- Memiliki kontrol yang sama terhadap sumberdaya pembangunan.

- Memperoleh manfaat dari hasil pembangunan

Cakupan dan batasan PUG:

Untuk menjamin terwujudnya PUG perlu diperhatikan :

- Memasukkan permasalahan gender dalam program pembangunan.
- Mengintegrasikan permasalahan gender dalam agenda pembangunan.
- Memasukkan kerangka gender dalam disain, pelaksanaan rencana dan program sektoral.
- Mengubah arusutama agar lebih responsive gender sehingga kondusif bagi tujuan keadilan dan kesetaraan gender.

PUG sebagai suatu strategi harus tercermin dalam empat fungsi utama setiap instansi lembaga maupun organisasi:

- Perencanaan: pernyataan tujuan yang jelas
- Pelaksanaan: memastikan berdampak positip
- Pemantauan: partisipasi dan manfaat
- Penilaian (evaluasi) : memastikan status setara karena strategi tsb.

Tujuan PUG

- Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender.
- Memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami marjinalisasi, sebagai dampak dari bias

gender.

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender dibidang masing-masing

Sasaran PUG

Seluruh kalangan masyarakat - dari tingkat pusat sampai dengan lini lapangan:

- Lembaga Pemerintah (Dept & Non Dept)
- Organisasi Perempuan
- LSM
- Organisasi Profesi
- Organisasi keagamaam
- Keluarga

Prinsip Penerapan PUG di Indonesia

- Menghargai keragaman pluralistis
- Bukan pendekatan dikotomis
- Melalui proses pemampuan sosialisasi dan advokasi
- Menunjang nilai HAM dan Demokrasi

Ruang Lingkup PUG mencakup aspek-aspek sbb:

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pemantauan dan

- Evaluasi

Prosedur dan Langkah-langkah PUG

Proses:

1. Pendataan para peserta pelatihan/advocator
2. Melaksanakan pelatihan/advokasi
3. Memahami visi, misi dan program organisasi serta menilai kepekaan gender yang terkandung di dalamnya.
4. Mengembangkan strategi operasional dan program aksi mencapai visi, misi, tujuan.
5. Menyediakan pangkalan data yang akurat.
6. Menyediakan data statistik gender
7. Menyediakan piranti analisis gender
8. Menyusun atau menyediakan indikator gender

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam PUG

- Meninjau/menelaah pesan dalam : Propenas, Propeda
- Mempelajari statistik gender dan formulasi solusinya
- Mengidentifikasi masalah
- Meninjau kembali kebijakan, visi, misi, tujuan organisasi (Buta, Bias, Netral dan Responsif gender)
- Jika bisa dilakukan reformulasi
- Presentasikan hasil revisi kepada pejabat berwewenang
- Adakan sosialisasi rencana yang telah direvisi
- Bentuk Gender Focal Point (GFP) di setiap departemen / sektor

- Menyusun petunjuk pelaksanaan kebijakan dan program aksi

5. Gender dalam Dunia Pendidikan

A. Indikator Gender

Upaya memahami gender bidang pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang indikator gender. Karena indikator gender dapat dijadikan alat untuk menilai kondisi pendidikan dalam rangka mengidentifikasi isu-isu gender bidang pendidikan. Indikator memperlihatkan kepada kita seberapa jauh kemajuan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang apa itu indikator dan Indikator gender.

Indikator adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dari suatu program/kegiatan, yang terdiri dari indikator masukan *(input),* proses (*proces),* keluaran *(output*) dan hasil *(outcomes*). Dengan kata lain, indikator adalah alat ukur statistik yang dapat menunjukkan perbandingan kecenderungan atau perkembangan satu hal yang menjadi pokok perhatian . Tujuan menggambarkan apa yang ingin kita capai**.** Indikator Input: ukuran yang menggambarkan sumberdaya atau modal dasar yang digunakan untuk melaksanakan suatu program/kegiatan.

Contoh : ***Dana*** *: sekian rupiah*

Tenaga *: sekian guru (laki-laki dan perempuan)*

Sarana *: apa saja & berapa tahun 2025*

Indikator Proses/Kegiatan : ukuran yang menggambarkan perkembangan pogram / kegiatan yang terjadi atau yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Contoh : Dibangunnya satu GOR yang lengkap di SMA A kecamatan X tahun 2018.

Indikator Output/Keluaran ; ukuran yang menggambarkan keluaran langsung dari suatu program/kegiatan. Contoh : Tersedianya satu GOR yang lengkap di SMA A kecamatan X tahun 2018. Indikator Outcomes/Hasil ; ukuran yang menggambarkan hasil dari suatu program /kegiatan. Contoh : Terlayaninya 80 % siswa perempuan dan laki-laki di setiap SMA pada kecamatan X tahun 2018.

Dapat pula dibedakan atas indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif memperlihatkan hasil, rata-rata, hasil atau tingkat yang dihitung sejauh mana tujuan sudah dicapai. Indikator kualitatif didasarkan pada informasi deskriptif yang menangkap perbedaan gender kualitatif (tidak bisa dengan mudah dihitung). Indikator kualitatif lebih sulit untuk dihitung dibandingkan indikator kuantitatif karena terkait sikap, persepsi, dan opini yang seringkali subjektif, untuk itu dapat diubah dengan menggunakan skala dalam bentuk peringkat Misalnya baik- cukup- kurang dengan bobot skala 3-2-1

Kriteria untuk seleksi indikator:

1. Merujuk untuk mengurangi menurunkan atau menghapus ketidakadilan gender
2. Pemilahan seks
3. Relevant terhadap kebutuhan
4. Mudah dan dimengerti
5. Dikembangkan secara partisipatori

Indikator gender yang pernah dipakai sejak tahun 1950-an sampai sekarang mengalami perkembangan tertentu. Pendekatan yang digunakan pada tahun 1950-an (sesudah perang dunia kedua) lebih bersifat ekonomis. Indikator gender juga bernuansa ekonomi. Dalam periode ini indikator yang dipakai masih bersifat agregat (tidak terpilah menurut jenis kelamin).

Pada tahun 1970-an sampai dengan awal 80-an pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kebutuhan (*Basic Need approach).* Indikator yang dipakai adalah indikator sosial yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan kependudukan. Data yang digunakan masih bersifat agregat (tidak terpilah).

Pada tahun 1980-an pengaruh pandangan / konsep ketelibatan perempuan dalam pembangunan mulai terlihat. Pemberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan (WID) menjadi acuan penentuan indikator. Indikator terpusat pada perempuan.

Selanjutnya pada tahun 1990-an fokus mulai terarah pada pembangunan manusia. Acuan indikator mulai mengarah pada konsep gender. Indeks pembangunan manusia (IPM) dipakai pada periode ini. Tema gender mulai dipakai dengan mengacu pada harapan hidup, melek huruf dan daya beli.

Pada akhir tahun 1996 tema gender menjadi sentral dalam penentuan indikator. *Gender development index* (GDI). GDI dimulai dengan darnpak kebijakan terhadap perempuan dan laki- laki. Misalnya, pada tanggal 22 Mei 2001 ditetapkan 5 sektoryang ditentukan untuk mengevaluasi indeks gendernya, yaitu : sektor Tenaga Kerja, Pendidikan, Kesehatan, Hukum, dan Koperasi.

Indikator tanggap gender digunakan untuk mengukur kemungkinan efek dan dampak berbeda dari upaya-upaya pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki. Indikator gender digunakan untuk merencanakan, memantau dan mengevaluasi efek kebijakan, program dan kegiatan kesetaraan gender, dan tentunya mensyaratkan analisis gender. Indikator gender bidang pendidikan menunjukkan data dan informasi spesifik gender bidang pendidikan sehingga memudahkan penilaian yang akurat terhadap pencapaian sasaran kesetaraan gender di bidang pendidikan.

B. Perkembangan PUG Bidang Pendidikan

Sebagaimana dijelaskan pada modul 2.6 bahwa PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut PUG Pendidikan adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pendidikan. (PerMendiknas Nomor 84 Tahun 2008).

Dengan PUG, maka setiap kebijakan pemerintah dan seluruh aksi masyarakat harus menjadikan gender sebagai arus utama pembangunan. Di bidang pendidikan masih dijumpai adanya kesenjangan gender baik dilihat dari aspek perluasan akses dan pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi serta manajemen pendidikan. Pada aspek akses dan pemerataan pendidikan terjadi kesenjangan gender pada Angka partiipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Melek Huruf. Pada aspek mutu dan relevansi terjadi bias gender antara lain dalam materi bahan ajar dan pada aspek manejemen sekolah. Sementara itu dalam aspek manajemen pendidikan masih terjadi kesenjangan gender dalam representase perempuan maupun laki-laki sebagai pengambil kebijakan. Bentuk kesenjangan gender itu sendiri bervariasi antara wilayah di Indonesia , di NTT, antar desa kota maupun status sosial, ekonomi.

Atas dasar hal tersebut berbagai program dan kegiatan PUG bidang pendidikan telah disusun dan dikembangkan antara lain oleh Pokja PUG

Depdiknas baik di Pusat maupun di daerah. Adapun tujuan PUG bidang pendidikan yang dikoordinasikan melalui Pokja PUG adalah membantu para pengambil keputusan di Depdiknas dalam upaya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai komponen sistem pendidikan nasional melalui penetapan kebijakan, perluasan pemahaman, serta penyusunan rencana aksi nasional, melalui penetapan kebijakan, perluasaan pemahaman, serta penyusunan rencana aksi nasional bidang pendidikan yang berwawasan gender. Pemahaman akan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender pada berbagai dimensi sistem pendidikan tidak saja dilakukan pada tingkat pusat tetapi juga para pelasana serta *stakeholder* pendidikan di daerah dan satuan pendidikan, seperti kepala sekolah, guru-guru, dewan pendidikan maupun komite sekolah.

C. Implementasi PUG bidang Pendidikan

PUG diarahkan pada upaya menangani persoalan kesenjangan gender yang terjadi pada sektor pendidikan yang menyangkut isu akses, pemerataan, perluasan, dan keadilan dalam pendidikan, mutu dan relevansi, dan efisien manajemen pendidikan. PUG hendaknya tercermin dan terpadu dalam empat fungsi utama manajemen program setiap instansi, lembaga maupun organisasi yaitu;

- Perencanaan, menyusun pernyataan atau tujuan yang jelas bagi perempuan dan laki-laki.
- Pelaksanaan, memastikan bahwa strategi yang dijelaskan mempunyai dampak pada perempuan dan laki-laki.
- Pemantauan, mengukur kemajuan dalam pelaksanaan program dalam hal partisipasi dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.
- Penilaian, memastikan bahwa status perempuan maupun laki- laki

sudah menjadi lebih setara/seimbang sebagai hasilprakarsa tersebut.

Adapun aspek yang telah diberi muatan PUG di sektor pendidikan antara lain aspek kebijakan., aspek kelembagaan**,** aspek sistem informasi dan aspek sumber daya manusia. Misalnya dalam aspek kebijakan dengan mengintegrasikan dan memasukkan prioritas dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara sistimatis dan eksplisit dalam semua kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pendidikan. Menganalisis kebijakan pendidikan apakah cocok dengan kebutuhan pengguna baik laki-laki mapun perempuan, dan melaporkan dampak gender yang diharapkan dan yang sesungguhnya sebagai alat pertanggungjawaban dan f*eedback* guna *replanning.*

PUG dalam Aspek sumber daya manusia di sektor pendidikan, dilakukan analisis gender dalam rekrutmen dan promosi. Fakta menunjukkan perempuan tertinggal dibandingkan dengan laki-laki dengan salah satu indikator adalah mayoritas laki-laki menduduki posisi kunci dan perempuan menduduki posisi rendah. Akibatnya suara perempuan tidak ada dalam mekanisme pembuatan keputusan pendidikan. Dalam rangka meningkatkan dan mempercepat PUG sektor pendidikan salah satu cara yang dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan sosialisasi gender dari pusat sampai unit pelaksana. Bentuk-bentuk penguatan kelembagaan, misalnya pendidikan, pelatihan, sosialisasi, advokasi. Secara terencana dilakukan pula terobosan baru seperti memberi tanggung jawab untuk PUG dengan deskrpisi tugas yang jelas, meningkatkan akuntabilitas untuk PUG dan memasukkan masalah-masalah yang relevan gender dalam promosi kesetaraan yang efektif. Disamping itu, untuk meningkatkan kapasitas lembaga maka dibentuk *gender focal point* dan Pokja PUG di pusat dan di daerah.

Pokja PUG pendidikan adalah suatu Tim yang dibentuk dalam rangka mensukseskan upaya perwujudan keadilan dan kesetaraan gender dibidang

pendidikan, khususnya dalam rangka mencapai sasaran pendidikan untuk semua (EFA) tahun 2015, yaitu terjaminnya semua anak perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan akses pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu (Direktorat Penmas, 2008).

Pokja PUG pendidikan memiliki fungsi inisiasi, dinamisasi, dan penjamin mutu bagi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan berwawasan gender serta berbagai program PUG di pusat, daerah dan satuan pendidikan. Oleh karena itu, Pokja PUG pendidikan secara khusus bekerja untuk memperkuat kebijakan dan program yang berwawasan gender di lingkungan Depdiknas/Dinas yang bertanggung jawab terhadap pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Beberapa tahun terakhir, telah dilakukan PUG di sekolah- sekolah. Diharapkan sekolah-sekolah menjadi sekolahyang responsif gender. Sekolah yang responsif gernder adalah suatu sekolah yang baik aspek akademik, sosial, aspek lingkungan fisiknya, maupun lingkungan masyarakatnya memperhatikan secara seimbang baik kebutuhan spesifik untuk anak laki-laki maupun perempuan. (Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal, Depdiknas, 2008).

D. Bahan Ajar Gender

Bahan ajar merupakan salah satu aspek dari kurikulum. Bahan ajar yang adil dan setara bagi anak perempuan dan laki-laki (berwawasan gender) sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya ketimpangan gender atau streotipe gender. Stereotipe gender yang terkandung dalam bahan ajar dapat berdampak negatif terhadap upaya-upaya pencapaian keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional. Seperti diketahui dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) bidang pendidikan dinyatakan bahwa prioritas pembangunan pendidikan nasional ke depan secara sistematis diarahkan pada peningkatan mutu dan keunggulan, serta efisiensi pendidikan.

Selain komponen guru, bahan ajar merupakan salah satu sumber belajar yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar- mengajar. Adapun kegiatan belajar mengajar pada tingkatan khususnya pendidikan dasar dianggap sangat strategis dan instrumental karena terselenggara secara sistematis pada tahapan pembentukan kognitif dan afektif siswa. Sosialisasi dini di sekoiah tentang wawasan gender melalui bahan ajar akan berperan sangat besar mempengaruhi nilai, pandangan, sikap serta perbuatan seseorang. Lebih-lebih sosialisasi tersebut diberikan pada anak-anak usia pertumbuhan dan perkembangan, yaitu TK, SD pada saat mana suatu pengetahuan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi seperti tercermin dalam citra, sikap, perilaku, kepribadian dan seseorang mengenal sesuatu dalam hal ini kedudukan, peran dan hubungan gender makin terbentuk.

Hasil penilaian terhadap buku dan bahan ajar yang dilakukan oleh Pokja PUG Depdiknas 2002-2003 menunjukkan bahwa secara implisit maupunb eksplisit bahan ajar dalam buku-buku teks pelajaran di SD dan SMP menjelaskan pembagian peran perempuan dan laki-laki secara tidak setara dan tidak adil sehingga dapat mendorong persepsi yang negatif dalam hubungan gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa sampel buku teks pelajaran terdapat pesan-pesan yang diungkapkan sangat bias gender. Dampaknya terhadap sikap dan motivasi belajar siswa baik perempuan maupun laki-laki, akan sangat besar dan memiliki efek jangka panjang terhadap ketidak adilan dan ketidaksetaraan gender.

BahanYang Adil Dan Setara Bagi Anak Perempuan Dan Laki-laki

1. Bahan ajar yang adil dan setara bagi anak perempuan dan laki- laki (berwawasan gender) adalah bahan ajar yang mengajarkan /

memperlakukan / menggambarkan keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan Iaki-laki di dalam memperoleh akses, manfaat dan partisipasi dalam berbagai segi kehidupan serta penguasaan terhadap sumber-sumber teknologi ilmu pengetahuan dan informasi.

2. Menggambarkan potret perempuan dan laki-laki yang dinamis dalam setting budaya yang relevan. Contoh Perempuan dan laki- laki sama-sama dapat mencari kayu bakar dan menimbah air dari sumur /kali. Guru dapat menjelaskan bahwa laki-laki juga dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
3. Meninggalkan stereotipe yang keliru, sebagai contoh dalam buku sejarah hanya terdapat pahlawan laki-laki; Guru harusnya menambah pahlawan perempuan dalam catatan rencana mengajar atau dapat pula secara oral menambah informasi mengenai pahlawan perempuan. Contoh lain dalam buku mulok digambarkan perempuan menumbuk jagung dan "titi jagung", guru harus menambah informasi bahwa laki-laki juga dapat menumbuk jagung dan titi jagung, bahkan laki-laki lebih kuat dan cepat selesai bila menumbuk jagung dan titi jagung.
4. Menggambarkan aktivitas yang dilakukan untuk anak perempuan dan anak laki-laki dibuat seimbang. Guru dapat menjelaskan bahwa hak dan kewajiban anak perempuan dan laki-laki adalah sama. Anak perempuan juga membutuhkan waktu untuk bermain dan berolahraga. Anak laki-laki juga punya kewajiban untuk membantu mamanya di rumah. Jika dalam buku mulok lebih banyak diuraikan tentang kejuaraan yang diraih oleh anak laki-laki, maka perlu menambahkan informasi tentang kejuaraan yang diraih oleh anak perempuan. Contoh berikut, gambar tentang anak perempuan bermain, membantu orang

tua dan belajar, sama hal dengan aktivitas anak laki-laki bermain, membantu orang tua dan belajar.

E. Kiat Menulis Bahan Ajar (Berwawasan Gender)

Pesan untuk perlakuan yang adil dan setara antara perempuan dan laki- laki.

1. Pesan untuk perlakuan yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki dapat diintegrasikan ke dalam bahan ajar dengan cara sebagai berikut Tidak terlalu berat dan sarat dengan pesan-pesan yang eksplisit, untuk dikatakan bahan pelajaran yang sensitive gender. Misalnya dari awal sampai akhir pelajaran memuat tentang pesan, nilai, norma gender tanpa diselingi tema korelatif lainnya sehingga menjemuhkan peserta didik perempuan maupun laki-laki.
2. Pesan untuk perlakuan yang adil dan setara diintegrasikan ke dalam bahan pelajaran bisa dengan cara humoritis, dalam gambar/cerita-cerita yang bersifat kepentingan manusia, relevan dengan kehidupan nyata dan komunikatif.
3. Gambaran dan penyajian peran gender yang seimbang, misalnya peran yang dapat disandang oleh perempuan, juga disandang oleh laki-laki dan peran yang tidak dapat dipertukarkan.
4. Gambaran peran perempuan dan laki-laki di ranah produktif, ranah reproduktif dan di masyarakat. Contoh : ilustrasi peran produktif yang netral gender. Laki-laki dan perempuan masak gula air. (Sebaiknya ; laki-laki panjat pohon tuak/sadap tuak dan perempuan masak gula air).
5. Menampilkan gambar/cerita-cerita yang bersifat kepentingan masyarakat. Contoh: Diskus di kelurahan dengan topik membangun

tempat sampah. Dalam diskusi tersebut perempuan dan laki-laki berpartisipasi aktif mengusulkan tempat, waktu dan dana pembuatan tempat sampah.

6. Tata letak dan ukuran gambar ilustrasi diatur sedemikian rupa agar menarik. Contoh : Jika pesan-pesan gender lebih banyak penjelasan dan ingin ditekankan, maka ukuran ilustrasi gambar dapat diperkecil dan disajikan di sebelah kanan kertas. Demikian pula, jika ilustrasi gambarnya yang lebih di tonjolkan, seharusnya disajikan dengan ukuran yang besar dan letaknya di tengah kertas.
7. Menampilkan gambar/cerita-cerita yang relevan dengan kehidupan nyata. Contoh Diskusi kelompok di kelas 6 SD dengan topik, penggunaan internet.
8. Menggunakan bahasa yang komunikatif agar mudah dipahami.

Gambaran dan penyajian peran gender yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

- Menyajikan gambar peran yang selama ini disandang oleh laki-laki dapat pula disandang oleh perempuan, demikian pula sebaliknya. Contoh : Ayah mencuci piring, Budi menjaga adik, Kondektur perempuan, pilot perempuan, penjahit laki-laki.
- Menyajikan gambar peran biologis peran perempuan dan laki-laki yang tidak dapat dipertukarkan. Contoh : Perempuan yang sedang hamil, melahirkan dan menyusui.
- Menyajikan gambar peran perempuan dan laki-laki di ranah produktif dan dapat dipertukarkan. Contoh : Gambar laki-laki dan perempuan bekerja sebagai guru. Bapak penjahit dan mama pedagang.

- Menyajikan gambar peran perempuan dan laki-laki di ranah reproduktif biologis maupun sosial. Misalnya Perempuan sedang menyusui anak, laki-laki memberi susu botol kepada bayi-balita. Perempuan memasak dan laki-laki menyuapi oma yang sedang sakit.
- Menyajikan gambar peran perempuan dan laki-laki di ranah kemasyarakatan. Misalnya perempuan menjadi ketua RT, PLKB dan laki-laki sebagai sebagai ketua RT, kader posyandu.

DAFTAR PUSTAKA

Adler, S and Laney,J. 1993. *Managing Women*. Buckingham: Open University Press

Association for Womens Rights in Development (AWID), 2004, *Gender Mainstreaming: Can it Work For Womrens Rights ?* Spotligt 3 November

Boserup, Ester. 1975. *Integration of Women in Development.* New York : UNDP

Bhasin Kamla, 2000. *Understanding Gender*. New Delhi: Paul Press

Depdiknas, 2002. *Pedoman Penulisan Bahan Ajar Berwawasan Gender.* Jakarta: Subdin Pendidikan Perempuan Direktorat Pendidikan Masyarakat

Direktorat PENMAS. DJP Non Formal dan Informal, 2008. *Panduan Sekolah Berwawasan Gender*. Jakarta; Subdin Pendidikan Perempuan DPM

Fakih, M. 1996, *Analisis Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ihromi.T.o. (ed). 1990. *Kajian wanita Dalam Pembangunan.* Jakarta : Yayasan Obor

Kementerian PP. 2002. *Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dsalam Pembangunan Nasional*. Jakarta

KNPP RI, UNFPA dan BKKBN. 2005. *Panduan dan Bunga Rampai- Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender.* Jakarta: UNFPA

Moser, C.O. l993. *Gender Planning and Development Theory: Practice Training*.

London : Routledg

Mosse, J.C. l996. *Half the Word-Half a Change: An Introduction to Gender and Development.* London: Oxfam

Murniati, A.nunuk.P. 2004. *Getar Gende*r. Magelang: Indonesia Tera

Oakley, Ann. 1985. *Sex, Gender and Society*. England : Gower Publishing Company.

Porter Fenella and Caroline Sweetman, 2005. *Gender and Development-*

Mainsteaming A Criticasl Review.UK: Axfam GB

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2008 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*

Rosalin. 2001, *GAP dan POP*. Jakarta: Depdiknas Dirjen PLSP
Ratoe Oedjoe, Mien, l982, Aktivitas Perempuan dan Laki-laki Pedesaan NTT (Makalah), Kupang: FKIP

----------,2005. *Kesenjangan gender Dalam Pendidikan*. Kupang: Lemlit Undana

----------, 2007, *Fakta dan Permasalahan Gender*. Kupang : PPW Undana
----------(dkk), 2008. *Dampak Sosialisasi KDRT Terhadap Persepsi, Sikap dan Perilaku Masyarakat.* Kupang: Undana Press
Stoller,R. 1968. *In Interviewing Women a Contradiction on Terms (dalam Oakley,l972)* London: GPC.

Mosse, J.C. l996. *Half the Word-Half a Change: An Introduction to Gender and Development.* London: Oxfam

Murniati, A.nunuk.P. 2004. *Getar Gende*r. Magelang: Indonesia Tera

Oakley, Ann. 1985. *Sex, Gender and Society*. England : Gower Publishing Company.

Porter Fenella and Caroline Sweetman, 2005. *Gender and Development-Mainsteaming A Criticasl Review*.UK: Axfam GB
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2008 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*

Rosalin. 2001, *GAP dan POP*. Jakarta: Depdiknas Dirjen PLSP
Ratoe Oedjoe, Mien, l982, Aktivitas Perempuan dan Laki-laki Pedesaan NTT (Makalah),
Stoller,R. 1968. *In Interviewing Women a Contradiction on Terms (dalam Oakley,l972)* London: GPC.
Shakeshaft, C. 1994. *Women in Educational Management in the United States*.

New York: Sunny

Saptari, R. Dan Holzner, B. 1997. *Perempuan kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah Pengantar Studi Perempuan.* Jakarta: Grafiti-Kalyanamitra

Suryadi, A dan Idris, E. 2006. *Pengarusutaaan Gender di Bidang Pendidikan*.

Bandung : PT.Gesindo

Sweetman, Caroline (Edt). 2007. *Gender, Development, and Poverty*, UK: Oxfam GB

Supiandi Yusuf, 2008. *Bunga Rampai Pengarusutamaan Gender*,Jakarta: UNFPA

United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 2007. *Strong Foundation for Gender Equality in Early Childhood Care and* Education. Bangkok : UNESCO

Undang-Undang RI NO 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ,

Jakarta:CM Cemerlang

World Bank. 2001. *World Development Indicators*. CD Rom, Washington : World Bandung